



**PENGADILAN
NEGERI
Koba**

2022

**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2022**

**PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II
JL. GELORA NO. I KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH, KEL. PADANG MULIA, KEC. Koba
FAX. 0718-6911210
pengadilan.negeri.koba@gmail.com**

www.pn-koba.go.id

**KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI KOB**



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Koba



DERIT WERDINGSIH, S.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba

**HAKIM
PENGADILAN NEGERI KOBA**



TREMA FEMULA GRAFIT, S.H., M.H.



SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.



RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H.



MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H.



NOVIA NANDA PERTIWI, S.H.



DEVIA HERDITA, S.H.

**PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI KOBA**



SOFYAN, S.H., M.H
Panitera



PADLI, S.H.
Panitera Muda Perdata



YUSBET HARIRI, S.H.
Panitera Muda Pidana



ERWIN MARANTIKA, S.H.
Panitera Muda Hukum

**PEJABAT KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KOBA**



JAMALUDIN, S.H.
Sekretaris



NUR KAMALIA, S.H.
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala



YEYEN WAHYUNI, S.Kom.
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan



OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan

**PANITERA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI KOBA**



RENDRA, S.H.

**JURUSITA
PENGADILAN NEGERI KOBA**



EKO ARFANDI, S.H.



MARIHOT PANGIHUTAN

**STAF KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KOBA**



HARDI JUMAIDI, S.H.
Staf Kepaniteraan Perdata



ABAD RIBUNANURIN, A.Md.
Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan



YOHANA N. D. BR SIANTURI, A.Md., A.B.
Staf Kepaniteraan Pidana



SARTIKA RATNASARI SINAGA, S.E
Staf Kepegawaian dan Ortala



RIO FIRMANDO, S.H.
Staf Kepaniteraan Pidana



FITRAH SUDDRAJAT, S.E.
Staf Umum dan Keuangan



KGS. M. AZLAN SHAH, A.Md.A.B.
Staf Kepaniteraan Pidana



RONI EVI DONGORAN, S.H.
Staf Kepaniteraan Pidana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami buat sebagai laporan tentang apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Negeri Koba, dengan kata lain laporan ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban kinerja dari personil yang ada di Pengadilan Negeri Koba. Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini, dapat dilihat bagaimana hasil pelaporan tentang Manajemen Perkara, Manajemen Aset, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Pengadilan Negeri Koba berkeinginan dan bertekad untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung RI. “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” adalah visi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas, sebagaimana yang telah tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung RI.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini. Kami berharap Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya.

Koba, 13 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Koba,

RIZAL TAUFANI, S.H.,M.H.
NIP. 19770407 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kebijakan Umum Peradilan	1
C. Visi dan Misi.....	3
D. Renstra	3
BAB II.....	5
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
B. Penyelesaian Perkara.....	11
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	11
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	12
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	13
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi.....	13
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	14
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	14
1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	16
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	17
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	17
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	19
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	19

B. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai	20
C. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.....	21
D. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Pegawai	22
E. Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai	23
F. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai	24
G. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan yang Belum Terisi.....	25
1. Mutasi.....	27
2. Promosi	27
3. Pensiun.....	28
4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat).....	28
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN	
TEKNOLOGI INFORMASI	30
A. Pengelolaan Keuangan.....	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	40
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	56
1. Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Umum.....	56
2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	57
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	59
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	59
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	62
BAB VI PENGAWASAN	73
A. Internal.....	73
B. Evaluasi	74
BAB VII PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Tim Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba Kelas II.
- Lampiran 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Koba Kelas II.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perkara Pidana Tingkat Pertama	5
Tabel 2. 2. Perkara Perdata Tingkat Pertama	6
Tabel 2. 3. Perkara Pidana Tingkat Banding	8
Tabel 2. 4. Perkara Perdata Tingkat Banding	8
Tabel 2. 5. Perkara Pidana Tingkat Kasasi	9
Tabel 2. 6. Perkara Perdata Tingkat Kasasi	9
Tabel 2. 7. Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali	10
Tabel 2. 8. Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali	10
Tabel 2. 9. Matriks Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022	11
Tabel 2. 10. Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Putus Tepat Waktu) Tahun 2022	12
Tabel 2. 11. Putusan yang Diajukan Upaya Hukum pada Tahun 2022	13
Tabel 2. 12. Data Penyelesaian Perkara Yang Berhasil Melalui Mediasi Selama 2 Tahun Terakhir	14
Tabel 2. 13. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Selama 2 Tahun Terakhir	14
Tabel 2. 14. Rekapitulasi Pelayanan POSBAKUM Tahun 2022	16
Tabel 2. 15. Realisasi Pelayanan POSBAKUM Tahun 2022	17
Tabel 3. 1. Komposisi SDM Pengadilan Negeri Koba	19
Tabel 3. 2. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai	20
Tabel 3. 3. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 3. 4. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Pegawai	22
Tabel 3. 5. Komposisi SDM berdasarkan Usia Pegawai	23
Tabel 3. 6. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai	24
Tabel 3. 7. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan yang Belum Terisi	25
Tabel 3. 8. Daftar Mutasi Masuk	27
Tabel 3. 9. Daftar Mutasi Keluar	27
Tabel 3. 10. Daftar Promosi Jabatan	27
Tabel 3. 11. Daftar Promosi Pangkat	28
Tabel 3. 12. Daftar Hakim dan Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/ Non	

Teknis.....	28
Tabel 4. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah).....	32
Tabel 4. 2. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program.....	35
Tabel 4. 3. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) per Jenis Belanja.....	35
Tabel 4. 4. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) per Jenis Belanja.....	36
Tabel 4. 5. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	37
Tabel 4. 6. Target dan Realisasi PNBPF Fungsional Per Akun.....	38
Tabel 4. 7. Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Koba.....	52
Tabel 4. 8. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Pengadilan Negeri Koba.....	52
Tabel 4. 9. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Koba.....	55
Tabel 4. 10. Perangkat Keras Pendukung SIPP.....	56
Tabel 4. 11. Rincian Spesifikasi Server Penunjang SIPP pada Pengadilan Negeri Koba.....	58
Tabel 6. 1. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Koba.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	60
Gambar 5. 2. Kompensasi PTSP	61
Gambar 5. 3. Tampilan Halaman Utama Direktori Putusan	62
Gambar 5. 4. Menu Antrian Direktori Putusan pada Aplikasi SIPP	63
Gambar 5. 5. Tampilan Halaman Login Aplikasi e-SIGAP	64
Gambar 5. 6. Tampilan Halaman Depan Aplikasi e-SIGAP	64
Gambar 5. 7. Tampilan Halaman Login Aplikasi SEMADE	66
Gambar 5. 8. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SEMADE	66
Gambar 5. 9. Tampilan Halaman Login Aplikasi SPEISCIPIK	67
Gambar 5. 10. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SPEISCIPIK.....	67
Gambar 5. 11. Tampilan Halaman Login Aplikasi Eraterang.....	68
Gambar 5. 12. Tampilan Halaman Login Aplikasi SI-PANDANG	69
Gambar 5. 13. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SI-PANDANG	69
Gambar 5. 14. Tampilan Halaman Depan Aplikasi AKSI SIJAKA	70
Gambar 5. 15. Tampilan Halaman Aplikasi PANGSID	71
Gambar 5. 16. Nomor Layanan Whatsapp Bot Si SELAWANG	71
Gambar 5. 17. Tampilan Utama Aplikasi Bank Data APM	72
Gambar 5. 18. Tampilan Halaman Login Aplikasi e-COURT	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022.....	6
Grafik 2. 2. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Koba.....	7
Grafik 3. 1. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai	21
Grafik 3. 2. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin	22
Grafik 3. 3. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Pegawai	23
Grafik 3. 4. Komposisi SDM berdasarkan Usia Pegawai.....	23
Grafik 3. 5. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai	24
Grafik 4. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah).....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan dan substansi badan Peradilan Umum semakin jelas dan mantap, sesuai pasal 24 ayat 2 UUD Negara

Republik Indonesia, Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Koba merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH selaku Ketua Mahkamah Agung RI yang dipusatkan di Kota Melonguane berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Yang Baru.

Pengadilan Negeri Koba juga mempunyai tugas pokok yang sama dengan pengadilan negeri lainnya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986.

Dalam menjalankan organisasi perkantoran, Pengadilan Negeri Koba mengacu pada restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta PERMA No.7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan.

Pengadilan Negeri Koba mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan :

1. Kecamatan Koba
2. Kecamatan Lubuk Besar
3. Kecamatan Namang
4. Kecamatan Sungai Selan
5. Kecamatan Simpang Katis
6. Kecamatan Pangkalan Baru

Dengan adanya Pengadilan Negeri Koba pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan dibidang hukum Perdata, Pidana yang menjadi kewenangan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah.

C. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang multi kompleks dalam menangani perkara-perkara Perdata, Pidana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Peradilan Negara tertinggi.

Dengan sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Koba mempunyai visi yang sama dengan visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Koba yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi-Misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Koba.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koba.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Koba.

D. Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Koba.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Koba;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sesuai dengan arahan-arahan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tahun 2010, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan Pengadilan Negeri Koba adalah :

- Perbaikan manajemen perkara yang meliputi kedisiplinan dalam hal pelaporan-pelaporan perkara yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu;
- Perbaikan minutasi perkara;
- Perbaikan administrasi perkara dan berkas putusan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutkan dalam program diklat. Hal ini juga berkaitan dengan regenerasi SDM yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- Penertiban pengelola anggaran dan aset;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

Sistem pengawasan yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, telah berjalan dengan baik pada Pengadilan Negeri Koba.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Perkara Pidana Tingkat Pertama

Tabel 2. 1. Perkara Pidana Tingkat Pertama

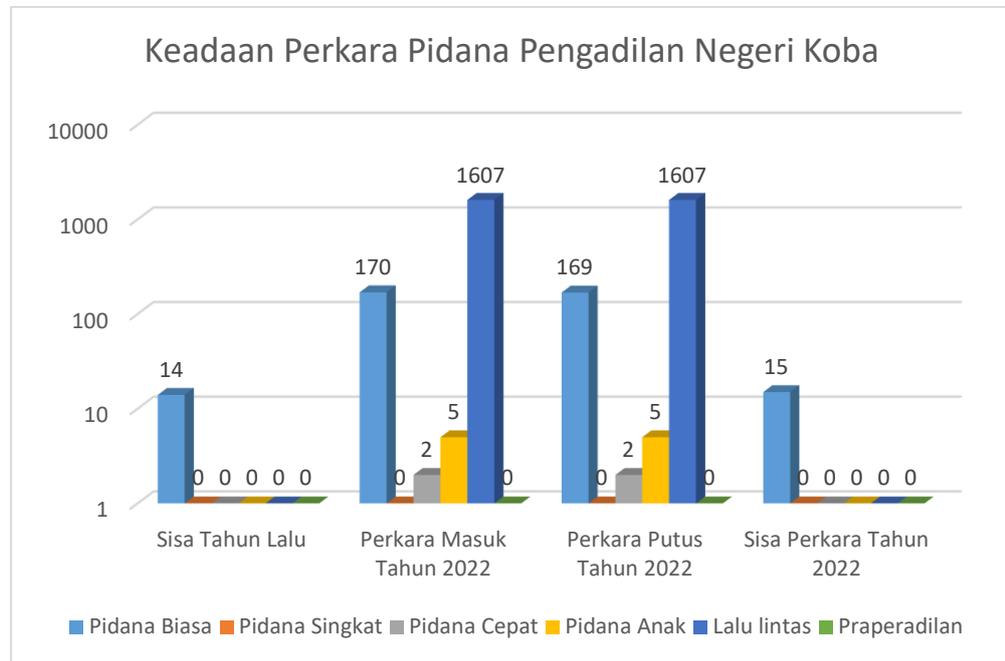
NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana Biasa	14	170	169	15	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pidana Cepat	-	2	2	-	
4	Pidana Anak	-	5	5	-	
5	Lalu Lintas	-	1.607	1.607	-	
6	Praperadilan	-	-	-	-	
JUMLAH		14	1.784	1.783	15	

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba menangani Perkara Pidana sebanyak 191 perkara, yang terdiri dari 14 perkara pidana sisa tahun 2021 dan 177 perkara pidana baru tahun 2022.
- 2) Dari 191 perkara pidana yang ditangani, berhasil diselesaikan ditahun 2022 sebanyak 176 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2022 mencapai 92,15%. Perkara yang masuk pada tahun 2022 belum semuanya dapat diputus ditahun 2022, karena perkara tersebut diterima pada bulan November dan Desember tahun 2022, sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses persidangan.
- 3) Untuk program tunggakan minutasi, dari 176 perkara pidana yang telah diputus, seluruhnya telah berhasil diminutasi (100%).
- 4) Sisa Perkara Pidana tahun 2022 yaitu sebanyak 15 perkara.

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Koba yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 1. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2022



b. Perkara Perdata Tingkat Pertama

Tabel 2. 2. Perkara Perdata Tingkat Pertama

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	4	31	30	5	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	16	16	-	
3	Perdata Permohonan	-	8	8	-	
JUMLAH		4	55	54	5	

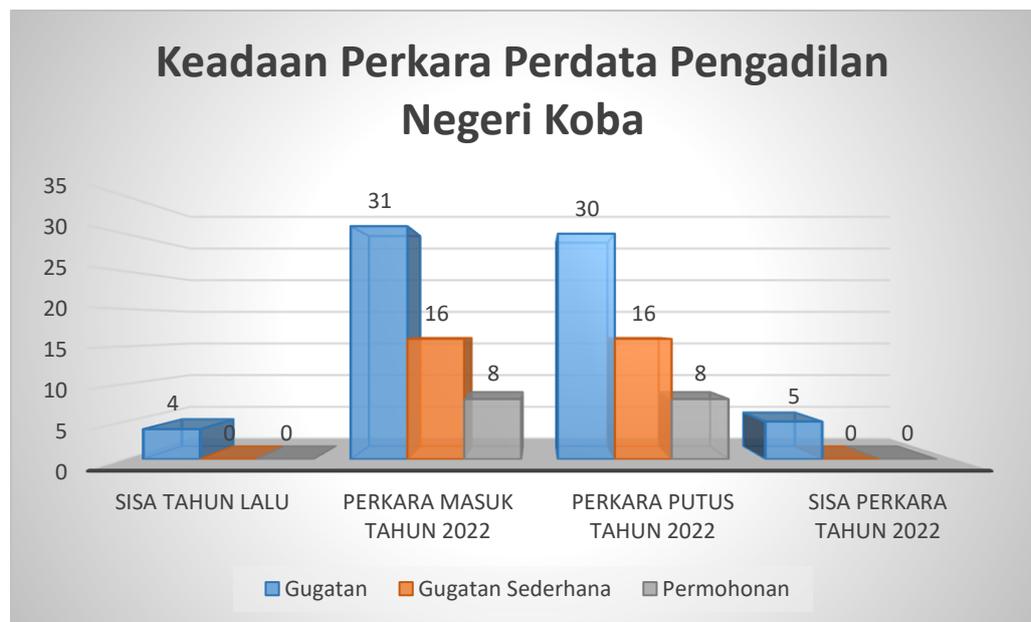
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba menangani perkara perdata sebanyak 59 perkara, yang terdiri dari 4 perkara perdata sisa tahun 2021 dan 55 perkara perdata baru tahun 2022.

- 5) Dari 59 perkara perdata yang ditangani, berhasil diselesaikan ditahun 2022 sebanyak 54 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara perdata tahun 2022 mencapai 91,53%. Perkara perdata yang masuk pada tahun 2022 belum semuanya dapat diputus ditahun 2022, karena perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum lewat dari 5 bulan.
- 2) Sisa perkara perdata pada tahun 2022 yaitu sebanyak 5 perkara.
- 3) Untuk program tunggakan minutasasi, dari 54 perkara perdata yang telah diputus, seluruhnya telah berhasil diminutasasi (100%).

Berikut keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Koba yang disajikan dalam bentuk grafit sebagai berikut:

Grafik 2. 2. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Koba



2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Pidana Tingkat Banding

Tabel 2. 3. Perkara Pidana Tingkat Banding

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana Biasa	1	12	12	1	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	
4	Pidana Anak	-	1	1	-	
5	Lalu Lintas	-	-	-	-	
6	Praperadilan	-	-	-	-	
JUMLAH		1	13	13	1	

b. Perkara Perdata Tingkat Banding

Tabel 2. 4. Perkara Perdata Tingkat Banding

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	-	2	2	-	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
3	Perdata Permohonan	-	-	-	-	
JUMLAH		-	2	2	-	

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Perkara Pidana Tingkat Kasasi

Tabel 2. 5. Perkara Pidana Tingkat Kasasi

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana Biasa	1	12	12	1	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	
4	Pidana Anak	-	1	1	-	
5	Lalu Lintas	-	-	-	-	
6	Praperadilan	-	-	-	-	
JUMLAH		1	13	13	1	

b. Perkara Perdata Tingkat Kasasi

Tabel 2. 6. Perkara Perdata Tingkat Kasasi

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	-	2	2	-	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
3	Perdata Permohonan	-	-	-	-	
JUMLAH		-	2	2	-	

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel 2. 7. Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana Biasa	3	8	7	4	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	
4	Pidana Anak	-	1	-	1	
5	Lalu Lintas	-	-	-	-	
6	Praperadilan	-	-	-	-	
JUMLAH		3	9	7	5	

b. Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel 2. 8. Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	2	2	1	3	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
3	Perdata Permohonan	-	-	-	-	
JUMLAH		2	2	1	3	

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022 adalah sebanyak 19 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 9. Matriks Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2021	SISA PERKARA TAHUN 2021 YANG DISELESAIKAN TAHUN 2022	PERSENTASE (%)	KET
1	Pidana Biasa	14	14	100 %	
2	Pidana Singkat	-	-	-	
3	Pidana Cepat	-	-	-	
4	Pidana Anak	-	-	-	
5	Lalu Lintas	-	-	-	
6	Praperadilan	-	-	-	
7	Perdata Gugatan	5	5	100 %	
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	
9	Perdata Permohonan	-	-	-	
JUMLAH		19	19	100 %	

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Berikut jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Koba:

Tabel 2. 10. Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Putus Tepat Waktu) Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	PERKARA YANG PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	%
1	Pidana Biasa	169	-	169	100 %
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	2	-	2	100 %
4	Pidana Anak	5	-	5	100 %
5	Lalu Lintas	1.607	-	1.607	100 %
6	Praperadilan	-	-	-	-
7	Perdata Gugatan	30	-	30	100 %
8	Perdata Gugatan Sederhana	16	-	16	100 %
9	Perdata Permohonan	8	-	8	100 %
JUMLAH		1.837	-	1.837	100 %

Pada tahun 2022 jumlah Perkara Putus pada Pengadilan Negeri Koba sebanyak 1.837 perkara dan semua perkara berhasil diputus tepat waktu. Perbandingan antara jumlah perkara putus dan perkara yang diputus tepat waktu sebesar 100 %.

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun 2022 sebanyak 152 Perkara Pidana Biasa, 2 Perkara Pidana Cepat, 1.607 Perkara Pidana Lalu Lintas, 4 Perkara Pidana Anak, 29 Perkara Perdata Gugatan, 16 Perkara Perdata Gugatan Sederhana, dan 8 Perkara Perdata Permohonan.

Tabel 2. 11. Putusan yang Diajukan Upaya Hukum pada Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	UPAYA HUKUM YANG DIAJUKAN			YANG TIDAK DIAJUKAN UPAYA HUKUM
		BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana Biasa	11	8	6	152
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	2
4	Pidana Anak	1	1	-	4
5	Lalu Lintas	-	-	-	1.607
6	Praperadilan	-	-	-	-
7	Perdata Gugatan	2	2	-	29
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	16
9	Perdata Permohonan	-	-	-	8
JUMLAH		14	11	6	1.818

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa hal baru yang diatur salah satunya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba melakukan mediasi terhadap 12 (dua belas) perkara Perdata, akan tetapi seluruh perkara tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 2. 12. Data Penyelesaian Perkara Yang Berhasil Melalui Mediasi Selama 2 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	MASUK	DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	% SELESAI VS MASUK
1	2020	3	-	0 %
2	2021	8	2	25 %
3	2022	12	-	0 %

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba menerima perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 3 perkara dan perkara tersebut tidak berhasil diselesaikan melalui proses diversi. Perbandingan antara jumlah perkara Pidana Anak yang masuk dan perkara yang diselesaikan melalui diversi sebesar 0 %.

Tabel 2. 13. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Selama 2 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	MASUK	DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	% SELESAI VS MASUK
1	2020	1	-	0 %
2	2021	1	-	0 %
3	2022	3	-	0 %

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang sesuai dengan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*), maka Pengadilan Negeri Koba turut serta mewujudkan dan menyediakan layanan standar peradilan yang bermutu yaitu berupa pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka Pengadilan Negeri Koba harus memiliki Manajemen Mutu. Manajemen Mutu adalah suatu sistem manajemen yang merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi dan terstandar yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses

terhadap kebutuhan pengadilan dalam memberikan pelayanan yang unggul/prima.

Sistem Manajemen Mutu merupakan persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Koba telah menyusun manual mutu, yang merupakan acuan atau pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem manajemen mutu, tugas dan fungsi serta tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Koba Kelas II.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, maka Pengadilan Negeri Koba telah berupaya untuk menjadi pengadilan yang lebih berperspektif pada pelayan publik, dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Koba. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar akreditasi. Akreditasi merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Badan Peradilan Umum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Pengadilan Negeri Koba Kelas II merupakan pengadilan tingkat pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan standar layanan peradilan yang bermutu yaitu berupa pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.

1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

Posbakum di Pengadilan Negeri Koba memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikan honorarium bagi petugas Posbakum yang dibebankan pada DIPA Eselon I Badan Peradilan Umum.

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan bantuan hukum. Kerjasama penyediaan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum tersebut tertuang dalam bentuk MoU/ Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani bersama pada tanggal 05 Januari 2022.

Pada tahun anggaran 2022, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan Posbakum ini sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*), dan target volume output sebesar 240 jam layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 23.900.000,- (99,58%) dengan capaian volume output sebesar 237 jam layanan.

Tabel 2. 14. Rekapitulasi Pelayanan POSBAKUM Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH CUSTOMER (ORANG)	JUMLAH LAYANAN (DALAM JAM)	KET
1	Januari	2	19	-
2	Februari	3	16	-
3	Maret	4	22	-
4	April	5	19	-
5	Mei	0	15	-
6	Juni	6	21	-
7	Juli	8	21	-

8	Agustus	7	22	-
9	September	2	22	-
10	Oktober	4	21	-
11	November	4	22	-
12	Desember	1	17	-
JUMLAH		46	237	-

Tabel 2. 15. Realisasi Pelayanan POSBAKUM Tahun 2022

No.	Nama Satker	Jumlah Pagu	Realisasi	Persentase
1	Pengadilan Negeri Koba	Rp. 24.000.000	Rp. 23.900.000	99,58%

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan peradilan dan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun pelayanan terpadu. Pada Pengadilan Negeri Koba, kebijakan untuk melakukan sidang keliling dipandang belum perlu karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba masih memungkinkan untuk dilakukan sidang secara langsung karena radius wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba masih terjangkau untuk dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Koba.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah Prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Syarat yang harus disiapkan untuk mengajukan perkara Prodeo berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2014 yaitu:

- a. KTP Pemohon;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/ Kepala Desa Setempat; atau
- c. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya, seperti:
 - Kartu Keluarga Miskin (KKM);
 - Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 - Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - Surat Pernyataan Tidak Mampu yang Ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan Diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Layanan Prodeo sudah gencar dilakukan sosialisasi oleh Pengadilan Negeri Koba, namun belum ada masyarakat yang mengajukan untuk mendapatkan layanan prodeo.

Tahun Anggaran 2022 DIPA Pengadilan Negeri Koba tidak memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun 2022 tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan

Tabel 3. 1. Komposisi SDM Pengadilan Negeri Koba

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.	PEMBINA (IV/a)	S2 Universitas 17 Agustus 1945
2	DERIT WERDININGSIH,S.H.	PEMBINA (IV/a)	S1 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
3	SHINTA NIKE AYUDIA,S.H,M.Kn.	PENATA(III/c)	S2 Universitas Gajah Mada
4	TREMA FEMULA GRAFIT,S.H.,M.H.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5	RIZKI RIDHA DAMAYANTI,S.H,.M.H.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S2 Universitas Airlangga Surabaya
6	MAGDALENA SIMANUNGKALIT,S.H	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1 Univ. Katholik Ind. Atmajaya
7	NOVIA NANDA PERTIWI,S.H.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1 UNPAD
8	DEVIA HERDITA,S.H.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1 Universitas Bangka Belitung Pangkalpinang
9	SOFYAN,S.H.,M.H.	PENATA TK.I (III/d)	S2 Universitas Bandar Lampung
10	JAMALUDIN,S.H.	PENATA TK.I (III/d)	S1 STIH YAPERTIBA Pangkalpinang
11	ERWIN MARANTIKA,S.H.	PENATA(III/c)	S1 Universitas Sriwijaya
12	YUSBET HARIRI,S.H.	PENATA(III/c)	S1 STIH YAPERTIBA Pangkalpinang
13	PADLI,S.H.	PENATA(III/c)	S1 STIH YAPERTIBA Pangkalpinang
14	OSKAR SYAIFULLAH,S.Kom.	PENATA(III/c)	S1 Universitas Budi Luhur
15	NURKAMALIA,S.H.	PENATA(III/c)	S1 STIH YAPERTIBA Pangkalpinang
16	YEYEN WAHYUNI,S.Kom.	PENATA MUDA TK.I	S1 STMIK ATMA LUHUR

		(III/b)	
17	RENDRA, S.H.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1 STIH SUMPAH PEMUDA PALEMBANG
18	EKO ARFANDI, S.H.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	S1 STIH YAPERTIBA Pangkalpinang
19	MARIHOT PANGIHUTAN	PENATA MUDA (III/a)	SMAN 4 Pangkalpinang
20	HARDI JUMAIDI, S.H.	PENATA MUDA (III/a)	S1 STIH YAPERTIBA Pangkalpinang
21	SARTIKA RATNASARI SINAGA, S.E.	PENATA MUDA (III/a)	S1 Universitas Methodist Indonesia
22	ABAD RIBUNANURIN, A.Md	PENGATUR (II/c)	D3 POLITEKNIK NEGERI BATAM
23	FITRAH SUDDRAJAT, S.E.	PENATA MUDA (III/a)	S1 Universitas Maritim Raja Ali Haji
24	RIO FIRMANDO, S.H.	PENATA MUDA (III/a)	S1 USU
25	YOHANA NURMALA DEWI, A.Md.AB	PENGATUR (II/c)	D3 POLITEKNIK NEGERI MEDAN
26	RONI EVI DONGORAN, S.H.	PENATA MUDA (III/a)	S1 UNPAD
27	KGS M AZLANSHAH, A.Md.	PENGATUR (II/c)	D3 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

B. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai

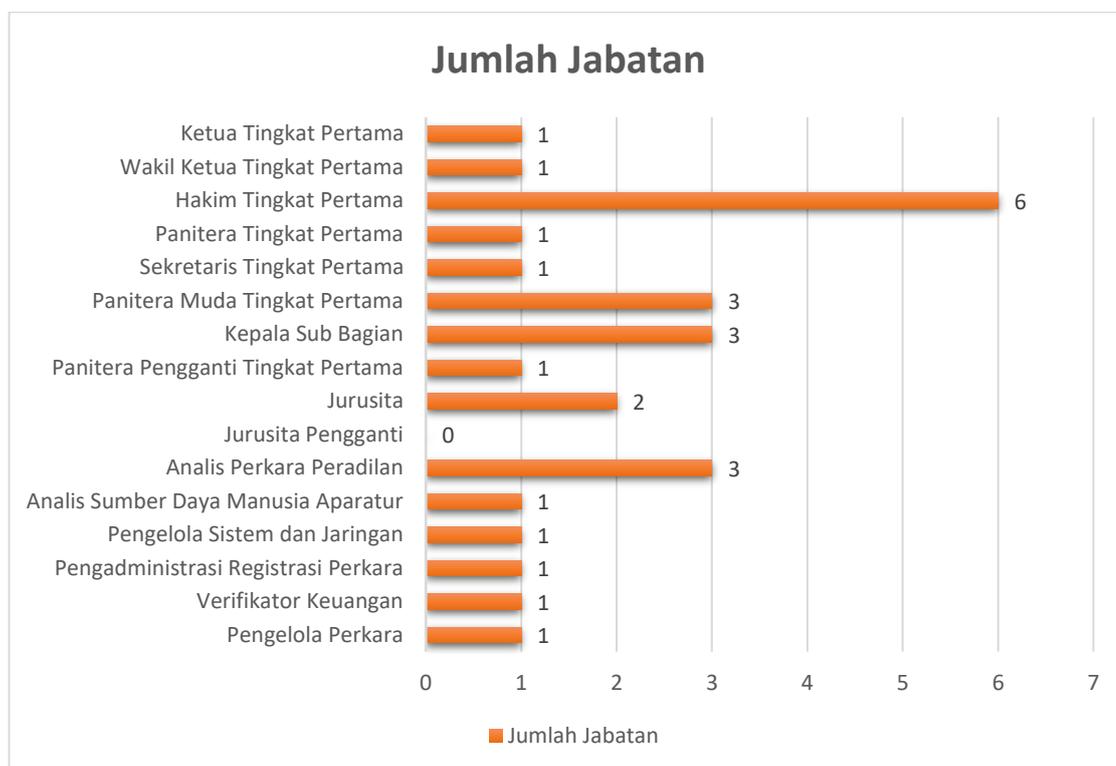
Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Pengadilan Negeri Koba memiliki komposisi SDM berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua Tingkat Pertama	1
2	Wakil Ketua Tingkat Pertama	1
3	Hakim Tingkat Pertama	6
4	Panitera Tingkat Pertama	1
5	Sekretaris Tingkat Pertama	1
6	Panitera Muda Tingkat Pertama	3
9	Kepala Sub Bagian	3
10	Panitera Pengganti Tingkat Pertama	1
11	Jurusita	2
12	Jurusita Pengganti	-
13	Analisis Perkara Peradilan	3
14	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1

15	Pengelola Sistem dan Jaringan	1
16	Pengadministrasi Registrasi Perkara	1
17	Verifikator Keuangan	1
18	Pengelola Perkara	1

Grafik 3. 1. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai



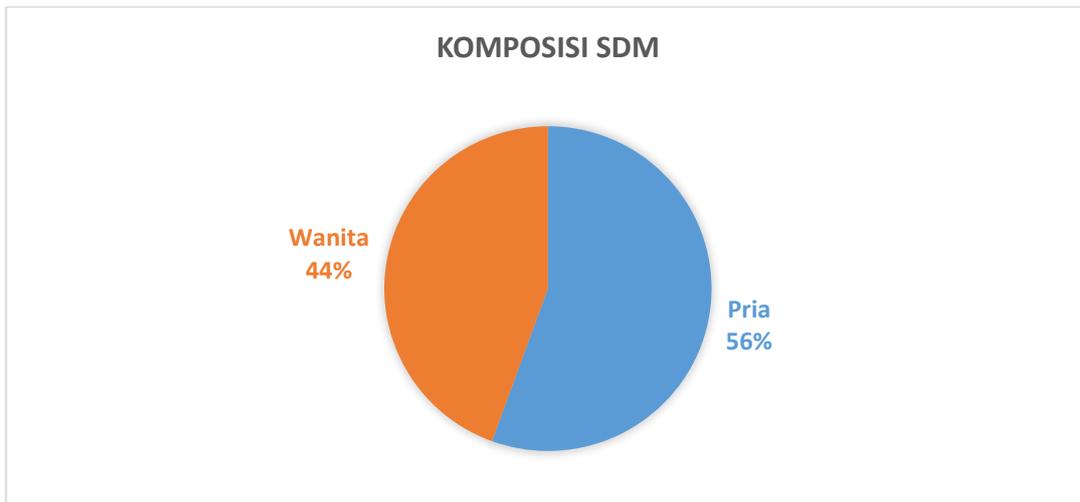
C. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 berdasarkan aplikasi SIKEP memiliki komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
PRIA	15
WANITA	12

Grafik 3. 2. Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin



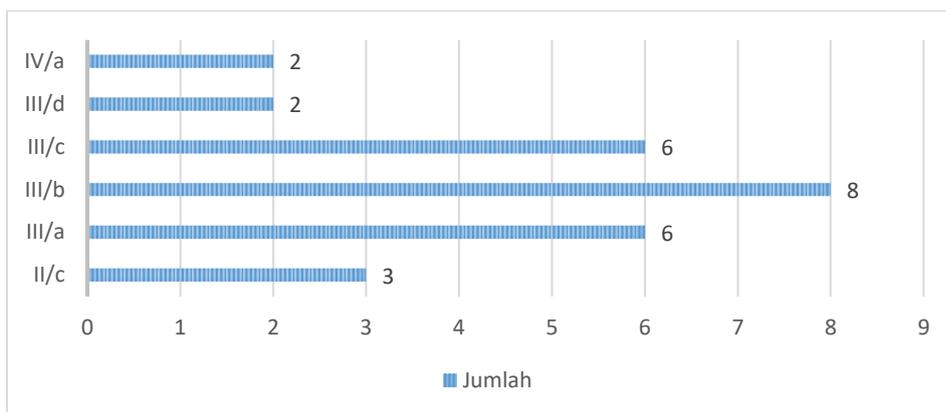
D. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Pegawai

Sesuai dengan Aplikasi SIKEP, Pengadilan Negeri Koba memiliki komposisi SDM berdasarkan Golongan Pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Pegawai

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	II/a	-
2	II/b	-
3	II/c	3
4	II/d	-
5	III/a	6
6	III/b	8
7	III/c	6
8	III/d	2
9	IV/a	2
10	IV/b	-
11	IV/c	-
12	IV/d	-
13	IV/e	-

Grafik 3. 3. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Pegawai



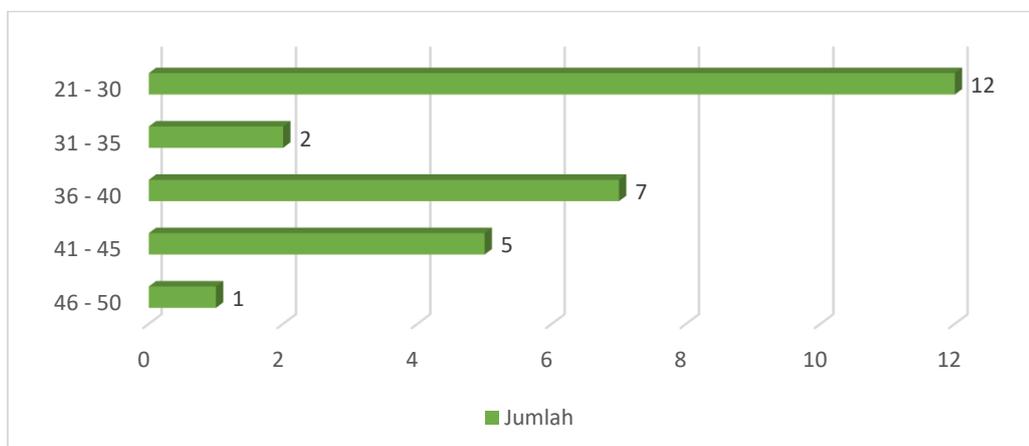
E. Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

Pada Tahun 2022 berdasarkan data yang telah diinput dalam aplikasi SIKEP, Pengadilan Negeri Koba memiliki Komposisi SDM berdasarkan Usia Pegawai yaitu seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5. Komposisi SDM berdasarkan Usia Pegawai

NO	USIA PEGAWAI	JUMLAH
1	21 – 30	12
2	31 – 35	2
3	36 – 40	7
4	41 – 45	5
5	46 – 50	1
6	51 – 55	-
7	56 – 60	-

Grafik 3. 4. Komposisi SDM berdasarkan Usia Pegawai



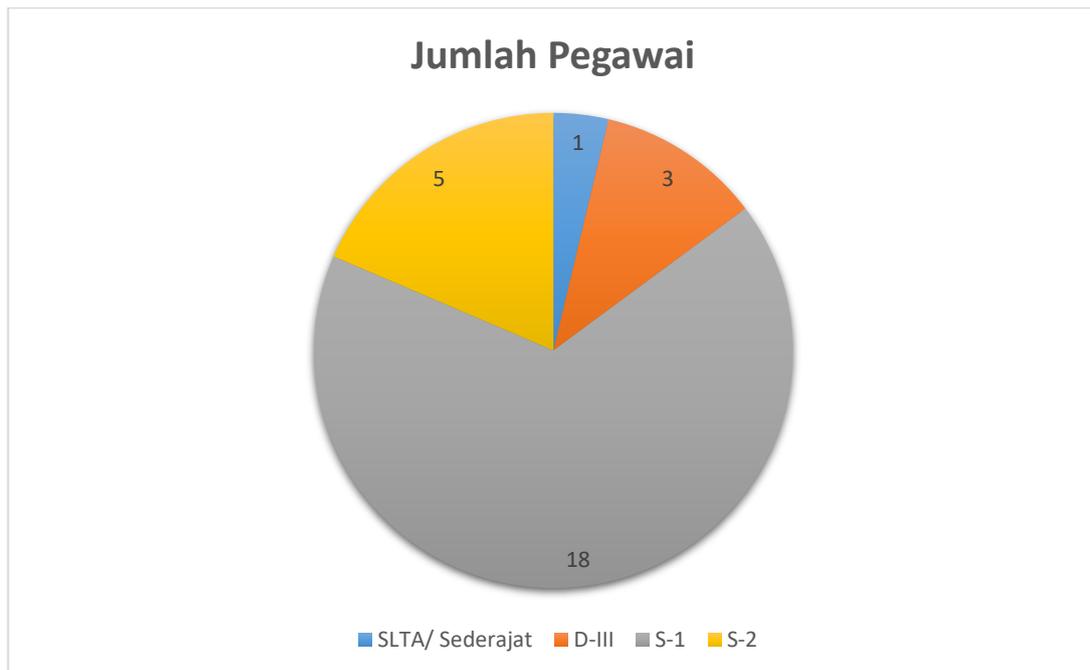
F. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

Berdasarkan data yang telah diinput dalam aplikasi SIKEP, Pengadilan Negeri Koba memiliki Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTA/ Sederajat	1
2	D-III	3
3	S-1	18
4	S-2	5
5	S-3	-

Grafik 3. 5. Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai



G. Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan yang Belum Terisi

Pengadilan Negeri Koba tahun 2022 mempunyai jabatan yang belum terisi sesuai dengan data berikut ini:

Tabel 3. 7. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan yang Belum Terisi

NO	JABATAN	JUMLAH SDM SEKARANG	JUMLAH SDM SEHARUSNYA	KEKURANGAN SDM
1	Ketua Pengadilan	1	1	-
2	Wakil Ketua Pengadilan	1	1	-
3	Hakim	6	11	5
4	Panitera Pengadilan	1	1	-
5	Sekretaris Pengadilan	1	1	-
6	Panitera Muda Pidana	1	1	-
7	Panitera Muda Perdata	1	1	-
8	Panitera Muda Hukum	1	1	-
9	Panitera Pengganti	1	16	15
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	1	-
11	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	1	-
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	1	-
13	Jurusita	2	3	1
14	Jurusita Pengganti	-	6	6
15	Analisis Perkara Peradilan	3	6	3

16	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	2	2
17	Analisis SDM Aparatur	1	2	1
18	Pengelolaan Data Informasi dan Hukum	-	2	2
19	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	2	1
20	Bendahara	-	2	2
21	Pengelola Kepegawaian	-	1	1
22	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	-	1	1
23	Pengadministrasi Persuratan	-	2	2
24	Penyusunan Laporan Keuangan	-	1	1
25	Pengelola BMN	-	1	1
26	Pranata Barang dan Jasa	-	1	1
27	Ajudan	-	2	2
28	Teknis Sarana dan Prasarana	-	2	2

1. Mutasi

Pada tahun 2022 terjadi beberapa mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, baik yang masuk ke Pengadilan Negeri Koba dan Keluar dari Pengadilan Negeri Koba, yaitu :

Tabel 3. 8. Daftar Mutasi Masuk

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	DERIT WERDININGSIH, S.H.	HAKIM PN PURWAKARTA	WAKIL KETUA PN Koba
2	SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.	HAKIM PN PRABUMULIH	HAKIM PN Koba
3	SOFYAN, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM PN GUNUNG SUGIH	PANITERA PN Koba

Tabel 3. 9. Daftar Mutasi Keluar

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H.	HAKIM PN Koba	HAKIM PT MEDAN
2	RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.	PANITERA PN Koba	PANMUD PIDANA PT BANGKA BELITUNG

2. Promosi

Pada tahun 2022 terdapat Promosi Jabatan dan Promosi Pangkat kepada beberapa Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Koba dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 10. Daftar Promosi Jabatan

NO	NAMA	JABATAN LAMA	PROMOSI JABATAN
1	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H.	HAKIM PN Koba	HAKIM PT MEDAN

Tabel 3. 11. Daftar Promosi Pangkat

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT LAMA	PANGKAT BARU
1	MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H.	HAKIM	III/a	III/b
2	NOVIA NANDA PERTIWI, S.H.	HAKIM	III/a	III/b
3	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H.	HAKIM	III/a	III/b
4	DEVIA HERDITA, S.H.	HAKIM	III/a	III/b
5	MARIHOT PANGIHUTAN	JURUSITA	II/d	III/a

3. Pensiun

Tidak ada Hakim dan Pegawai yang diusulkan Pensiun untuk Tahun 2022.

4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Pada Tahun 2022, beberapa pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Koba telah dipanggil untuk mengikuti diklat, baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ataupun instansi setempat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 12. Daftar Hakim dan Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/ Non Teknis

No.	Nama Hakim/ Pegawai	Nama Diklat Yang Diikuti	Nama Penyelenggara Diklat	Daring/ Luring	Sertifikat yang diberikan
1	RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.	Diklat Mediator Hakim Panitera Lingkungan Peradilan Umum	Pusdiklat MA RI	Daring & Luring	Ada
2	SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.	Diklat Perkara Gugatan Sederhana	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
3	MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H.	Diklat Akses Perempuan Terhadap Keadilan	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada

4	JAMALUDIN,S.H.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Daring	Ada
5	NURKAMALIA,S.H.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Luring	Ada
6	SARTIKA RATNASARI SINAGA,S.E	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Luring	Ada
7	HARDI JUMAIDI,S.H	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Negeri	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
8	FITRAH SUDDRAJAT,S.E	Diklat Prajabatan Golongan III	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
9	RIO FIRMANDO,S.H.	Diklat Prajabatan Golongan III	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
10	YOHANA N SIANTURI, A.Md.AB	Diklat Prajabatan Golongan II	Pusdiklat MA RI	Daring	Ada
11	RONI EVI DONGORAN, S.H	Diklat Prajabatan Golongan III	Pusdiklat MA RI	Daring & Luring	Belum Ada
12	KGS.M.AZLANSHAH A.Md.AB	Diklat Prajabatan Golongan II	Pusdiklat MA RI	Daring & Luring	Belum Ada

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Negeri Koba melaksanakan reformasi keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik (*clean government*) melalui implementasi perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1. Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

a) Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022

➤ DIPA 01

- Pada tanggal 22 Desember 2020 dilakukan penyusunan usulan anggaran tahun 2022.
- Pada tanggal 25 Mei 2021 dilakukan penyusunan pagu indikatif yang ditentukan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Koba menerima DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.401912/2022 tertanggal 17 November 2021.

➤ DIPA 03

- Pada tanggal 21 Juni 2021 dilakukan penyusunan pagu indikatif DIPA 03 Tahun Anggaran 2022 yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 dilakukan penelaahan RKA-K/L DIPA 03 Tahun Anggaran 2022 secara daring.

- Pengadilan Negeri Koba menerima DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor: SP DIPA-005.03.2.402020/2022 tertanggal 17 November 2021.

b) Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba

Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Negeri Koba menerima Rencana Kerja dan Anggaran berupa DIPA dengan detail sebagai berikut :

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401912/2022 tertanggal 17 November 2021, sebesar Rp. 4.821.701.000,-
- DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor : SP DIPA-005.03.2.402020/2022 tertanggal 17 November 2021, sebesar Rp. 102.838.000,-

Adapun perincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu program sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.821.701.000,- digunakan untuk kegiatan:
 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 4.592.101.000,- dengan Rincian Output sebagai berikut:
 - Layanan Umum sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Layanan Perkantoran sebesar Rp. 4.587.101.000,-
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 229.600.000,- dengan Rincian Output sebagai berikut:
 - Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Layanan Prasarana Internal sebesar Rp. 219.600.000,-

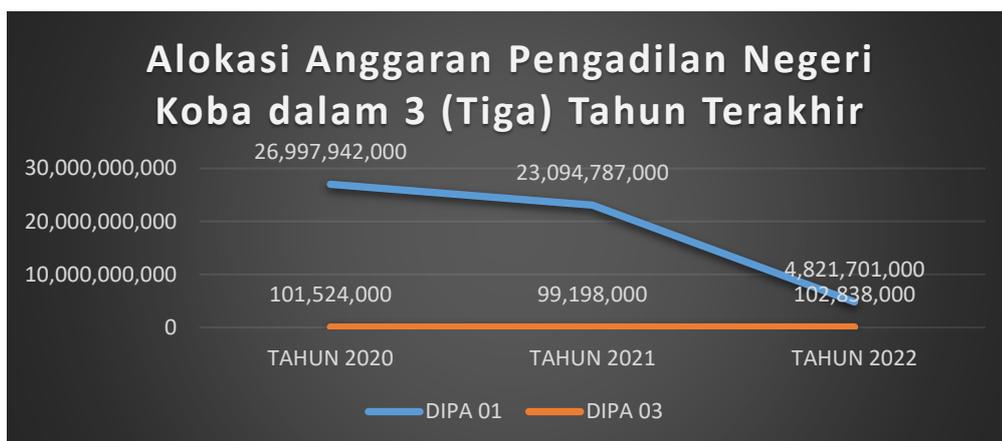
2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.838.000,- digunakan untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

- Koordinasi sebesar Rp. 3.640.000,-
- Perkara Hukum Perseorangan sebesar Rp. 75.198.000,-
- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan sebesar Rp.24.000.000,-

Tabel 4. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah)

NO	JENIS DIPA	TAHUN ANGGARAN APBN		
		2020	2021	2022
1	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	26.997.942.000	23.094.787.000	4.821.701.000
2	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)	101.524.000	99.198.000	102.838.000
TOTAL		27.099.466.000	23.193.985.000	4.924.539.000

Grafik 4. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah)



Dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa alokasi anggaran Pengadilan Negeri Koba pada tahun 2022 untuk DIPA 01 turun sebesar 79.12%. Dan untuk DIPA 03 naik sebesar 3,54% dari tahun 2021.

2. Pengelolaan APBN pada Pengadilan Negeri Koba

a) Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Selain perundang-undangan diatas, dalam penatausahaan pelaksanaan APBN Pengadilan Negeri juga berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu yang berlaku serta surat edaran yang berkaitan dengan penatausahaan pelaksanaan APBN.

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 162/PMK.05/2013, Pengadilan Negeri Koba dalam pelaksanaan APBN menggunakan sistem manajemen informasi keuangan negara yang dikembangkan oleh Kemenkeu berupa Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran (Satu DJA), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Om-Span) serta didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dari Mahkamah Agung.

b) Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam pelaksanaan PNBP, Pengadilan Negeri Koba juga berpedoman pada PMK, Perdirjen Kemenkeu, surat Kabua serta surat-surat edaran yang terkait dengan PNBP. Dalam penatausahaan PNBP Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan sistem manajemen informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI bernama Aplikasi PNBP melalui dukungan SIMARI online, sesuai dengan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 212-I/SEK/KU.01/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pemakaian Aplikasi PNBP pada SIMARI online. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Penerimaan mulai dari penetapan target PNBP, penerimaan uang PNBP, penyetoran uang PNBP, pembukuan PNBP, pelaporan Realisasi PNBP dilakukan menggunakan aplikasi ini, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam penatausahaan PNBP.

c) Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

Pelaksanaan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Koba telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) dengan didukung oleh Aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan serta mengikuti update aplikasi yang berkelanjutan.

Pengadilan Negeri Koba juga telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi e-RekonLK sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan S-4839/PB/2016.

3. Capaian Pengelolaan APBN Pengadilan Negeri Koba

a) Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2022 untuk pagu DIPA 01 dengan pagu anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp. 4.750.850.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 4.669.036.329,- mencapai persentase 98,85% dan DIPA 03 dengan pagu anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp. 102.838.000,- sampai dengan tanggal 31

Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 101.745.213,- mencapai persentase 98,94% dengan rincian sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 menurut Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 4. 2. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.521.250.000	4.466.463.329	98,79%	54.786.671	1,21%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	229.600.000	229.573.000	99,99%	27.000	0,01%
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	102.838.000	101.745.213	98,94%	1.092.787	1,06%
TOTAL		4.853.688.000	4.797.781.542	98,85%	55.906.458	1,15%

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 31 Desember 2022

2) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2022 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 4. 3. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) per Jenis Belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.196.088.000	3.141.847.030	98,30%	54.240.970	1,70%
2	Belanja Barang	1.325.162.000	1.324.616.299	99,96%	545.701	0,04%
3	Belanja Modal	229.600.000	229.573.000	99,99%	27.000	0,01%
TOTAL		4.750.850.000	4.696.036.329	99,85%	54.813.671	0,15%

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 31 Desember 2022

Pada tabel diatas dapat terlihat adanya sisa anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan:

- Belanja Pegawai :
 - Adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri Koba periode September 2022 sampai dengan Desember 2022 dan tidak ada penggantinya, sehingga realisasi Belanja Pegawai tidak maksimal.
- Belanja Barang :
 - Sudah optimal dengan serapan sebesar 99,96 %.
- Belanja Modal :
 - Sudah optimal dengan serapan sebesar 99,99%.

Tabel 4. 4. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) per Jenis Belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Barang	102.838.000	101.745.213	98,94%	1.092.787	1,06%
TOTAL		102.838.000	101.745.213	98,94%	1.092.787	1,06%

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 31 Desember 2022

Pada tabel diatas dapat terlihat adanya sisa anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan :

- Realisasi anggaran sudah memenuhi target perkara yang telah ditentukan.

3) Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 4. 5. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

NO	BELANJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
DIPA 01										
1	Pegawai	2.736.896.000	2.731.930.889	99,82%	3.128.403.000	3.079.438.090	98,43%	3.196.088.000	3.141.847.030	98,30%
2	Barang	863.443.000	858.095.882	99,38%	977.655.000	970.658.023	99,28%	1.325.162.000	1.324.616.299	99,28%
3	Modal	5.464.570.000	5.065.400.291	92,70%	19.913.814.000	19.891.041.188	99,89%	229.600.000	229.573.000	99,99%
DIPA 03										
1	Barang	101.524.000	100.980.000	99,46%	99.198.000	97.307.500	98,09%	102.838.000	101.745.213	98,94%
TOTAL (DIPA 01 + 03)		9.166.433.000	8.756.407.062	95,53%	24.119.070.000	24.038.444.801	99,67%	4.853.688.000	4.797.781.542	98,85%

Dari tabel diatas, dapat dilihat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 Tahun Terakhir. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, maka pada Tahun 2022 terdapat :

- Penurunan penyerapan Anggaran Belanja Pegawai sebesar 0,13%;
- Tidak ada kenaikan/penurunan penyerapan Anggaran Belanja Barang DIPA 01;
- Kenaikan penyerapan Anggaran Belanja Modal sebesar 0,10%; dan
- Kenaikan penyerapan Anggaran Belanja Barang DIPA 03 sebesar 0,85%.

4) Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2022

Pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan aplikasi SIMARI Online dalam hal penerimaan PNBP, pembukuan dan pelaporan, sedangkan dalam penyetoran PNBP memakai aplikasi SIMPONI dari Kementerian Keuangan.

Target PNBP Pengadilan Negeri Koba untuk tahun anggaran 2022 adalah Rp.6.831.179,- untuk PNBP Fungsional, sedangkan PNBP Umum tidak ditentukan target dikarenakan Pengadilan Negeri Koba belum ada aset yang menjadi sumber PNBP umum. Adapun realisasi PNBP Pengadilan Negeri Koba sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.191.500,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 6. Target dan Realisasi PNBP FUNGSIONAL Per Akun

NO	MAP	URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	20.000	0	0 %
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	720.000	500.000	69,40 %
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2.270.000	2.000.000	88,10 %
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.821.179	8.691.500	227.4%
TOTAL			6.831.179	11.191.500	163.8%

b) Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Untuk tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba mendapatkan dana untuk belanja modal setelah dilakukan revisi terakhir sebesar Rp.229.600.000,- yang terdiri dari :

1. Pengadaan printer Pengadilan Negeri Koba sebesar Rp. 10.000.000,- yang dilaksanakan pada bulan April 2022, dipercayakan pada CV. SOLUSI ARYA PRIMA dengan kwitansi nomor: P2202-285437/SAP-KW97/V-PLG/2022 tanggal 13 Mei 2022.
2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 3.700.000,- yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022, dipercayakan pada CV. PAMEN SEJAHTERA dengan kwitansi nomor : PNJ-TOKO1-00313 Tanggal 14 Desember 2022.
3. Pembangunan/renovasi pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2022 terdiri dari :
 - Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Pengadilan Negeri Koba yang dipercayakan pada CV. TUJUH KARYA dengan nomor kontrak : 007/SPK/PL.01/Pos/05/2022 Tanggal 13 Mei 2022, BAP Nomor : 010/ SPK/PL.01/Pos/5/2022 Tanggal 24 Mei 2022, Jaminan Uang Muka Nomor : 1026114322050006 Tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 58.800.000,-.
 - Pembayaran Pertama Untuk Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Kantor Pengadilan Negeri Koba Sesuai dengan KWITANSI Nomor : 10/KONSULTAN/PL/VII/2022 TANGGAL 01 Juli 2022 sebesar Rp. 9.865.000,-.
 - Pembayaran 100% Pembangunan Pos Jaga pada Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022 sesuai BAST No.020/SPK/PL.01/Pos/8/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, BAP No.020/SPK/PL.01/Pos/8/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp. 137.200.000,-.

c) Penghapusan

Pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba belum mengadakan penghapusan.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung dan Bangunan

Gedung kantor Pengadilan Negeri Koba beralamat di Jalan Gelora No. 1, Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kel. Padang Mulya, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, dengan luas Gedung dan Bangunan seluas 2.496 m² dan Halaman Kantor seluas 4.829 m². Gedung Pengadilan Negeri Koba dibangun Tahun 2020 diatas tanah seluas 7.375m². Bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Koba terdiri dari 2 lantai dengan nilai Rp. 23.732.561.479,-.

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Koba adalah:

a. Ruang Pelayanan, terdiri dari:

- 1 Ruang PTSP
- 3 Ruang Sidang Umum
- 1 Ruang Sidang Anak
- 1 Ruang Teleconference
- 1 Ruang Tunggu Pelayanan PTSP
- 2 Ruang Tunggu Sidang
- 1 Ruang Tunggu Ramah Anak
- 1 Ruang Laktasi
- 1 Ruang Diversi
- 1 Ruang Kesehatan
- 1 Ruang Jaksa
- 1 Ruang Kaukus
- 1 Ruang Penasihat Hukum/BAPAS
- 1 Ruang Posbakum
- 1 Ruang Kasir

- 1 Ruang Inzage
- 1 Ruang Mediasi
- 4 Ruang Tahanan
- 1 Ruang Tamu Terbuka
- 1 Ruang Ramah Anak

b. Ruang Kerja, terdiri dari:

- Ruang Ketua
- Ruang Wakil Ketua
- Ruang Hakim
- Ruang Panitera
- Ruang Sekretaris
- Ruang Kepaniteraan Pidana
- Ruang Kepaniteraan Perdata
- Ruang Kepaniteraan Hukum
- Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
- Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
- Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Ruang Panitera Pengganti
- Ruang Jurusita
- Ruang Kasir
- Ruang Inzage
- Ruang Arsip
- Ruang Rapat
- Ruang APM/Document Control
- Ruang ADC
- Ruang Command Center

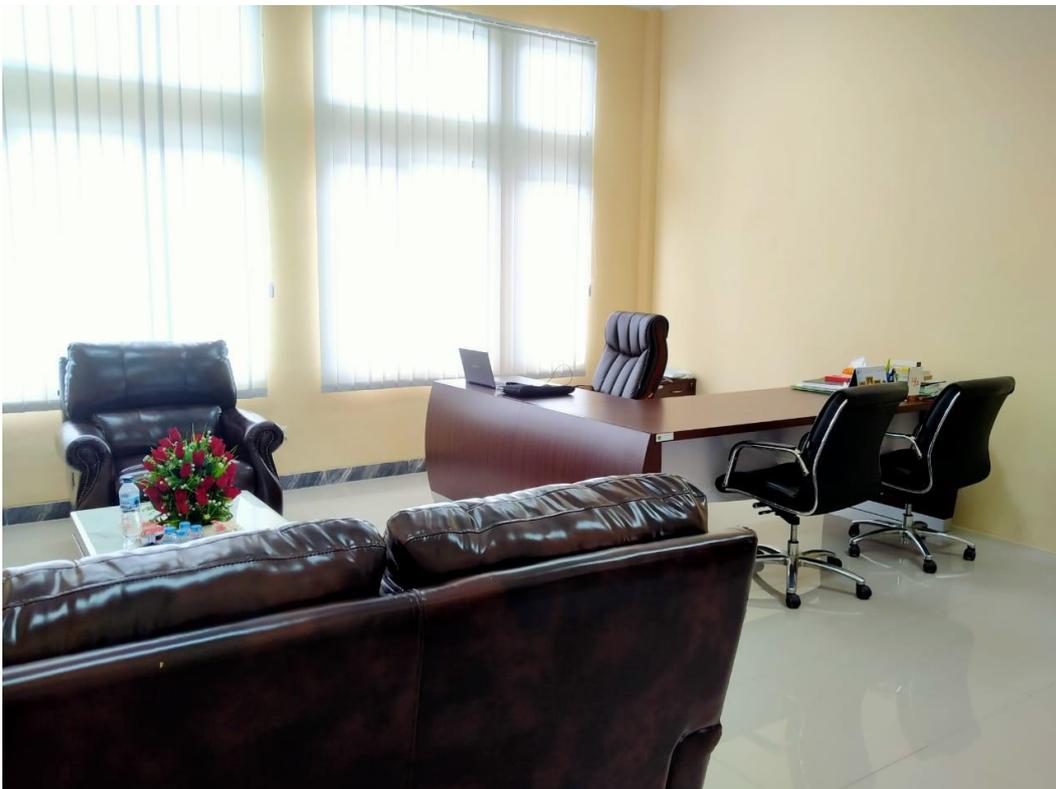
RUANG PTSP



RUANG KERJA KETUA



RUANG KERJA WAKIL KETUA



RUANG KERJA PANITERA



RUANG KERJA SEKRETARIS



RUANG KERJA KEPANITERAAN



**Ruang
Kepaniteraan Pidana**



**Ruang
Kepaniteraan Perdata**



**Ruang
Kepaniteraan Hukum**

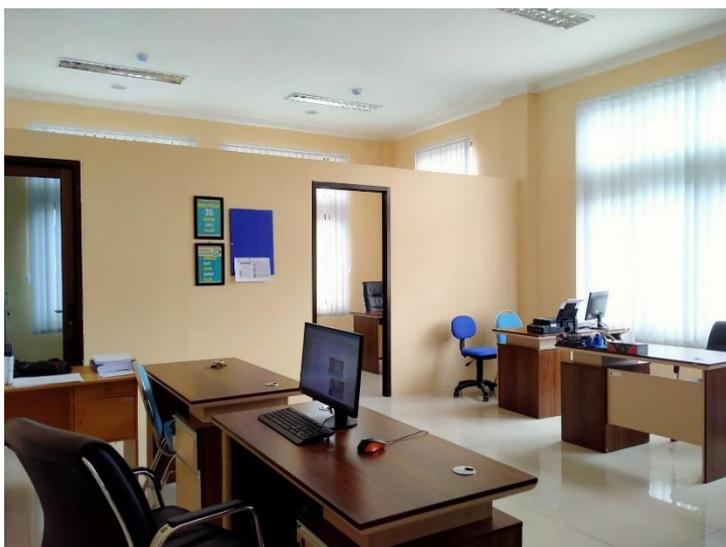
RUANG KERJA KESEKRETARIATAN



**Ruang
Sub Bagian PTIP**



**Ruang
Sub Bagian Kepegawaian
Dan Ortala**



**Ruang
Sub Bagian Umum
Dan Keuangan**

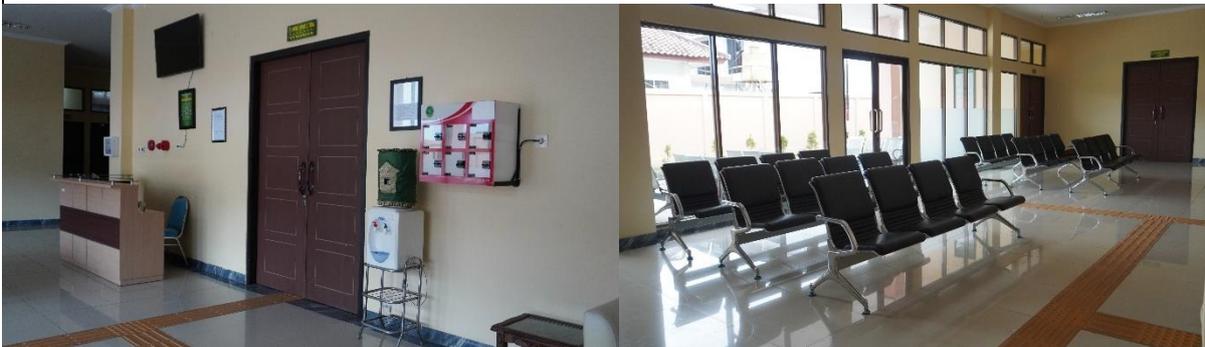
SARANA DAN PRASARANA



Ruang Sidang Utama

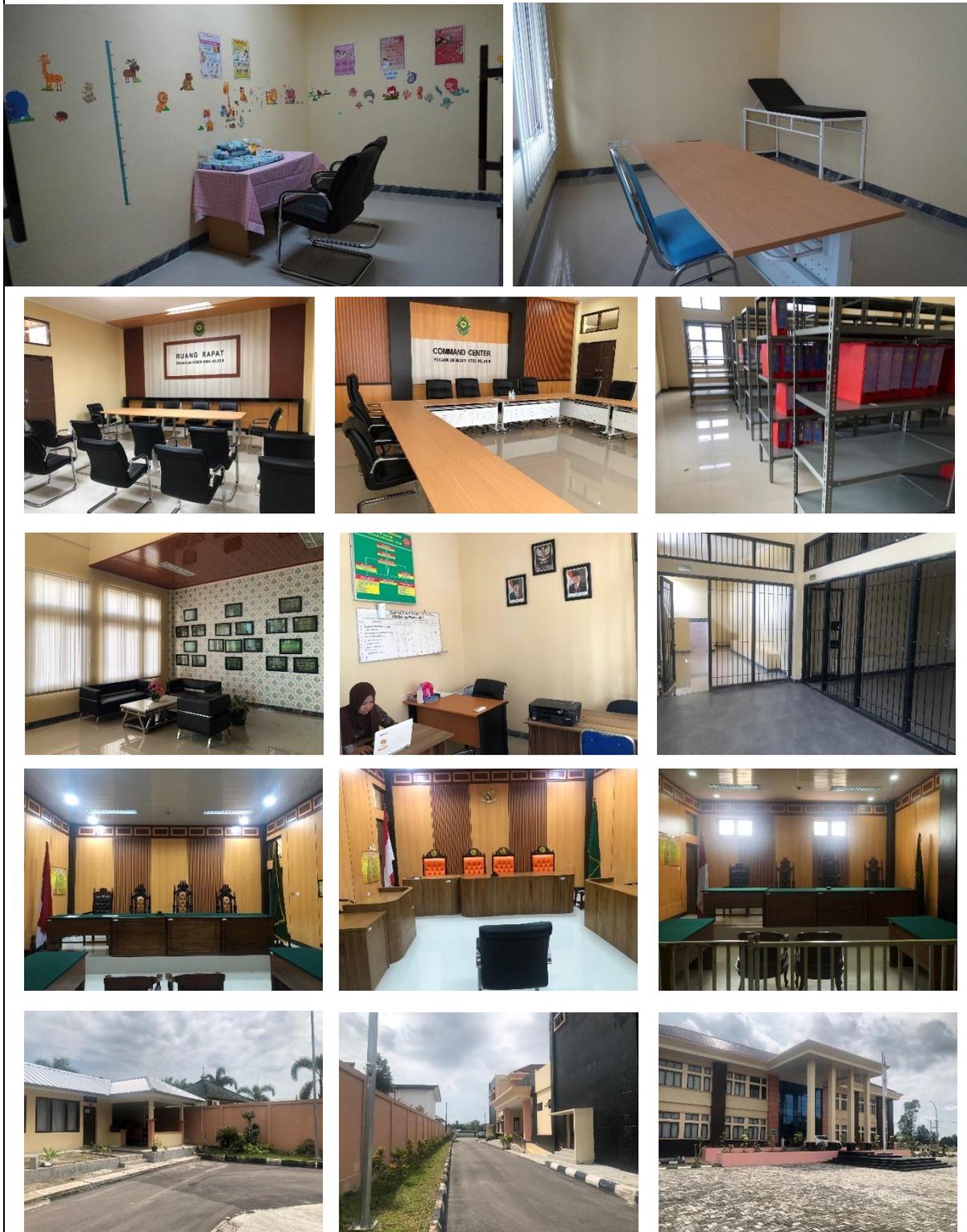


Ruang Tunggu Pelayanan PTSP



Ruang Tunggu Sidang

SARANA DAN PRASARANA



2. Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

- a. Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tidak ada kendala yang cukup berarti.
- b. Untuk pengarsipan surat sudah ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi Ketua atau Panitera maupun Sekretaris, sedangkan arsip surat keluar dipusatkan dan disimpan di bagian umum dan keuangan dan disetiap bagian yang mengeluarkan surat.
- c. Jumlah surat masuk sampai Per 31 Desember 2022 adalah sebesar 94 surat sedangkan untuk surat keluar sebesar 270 surat.
- d. Register surat masuk dan surat keluar sudah terisi secara lengkap di aplikasi PTSP+ Pengadilan Negeri Koba.

3. Bidang Perpustakaan Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

- a. Telah dilakukan penataan kembali buku-buku perpustakaan.
- b. Buku perpustakaan yang baru sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN.
- c. Buku-buku perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, dan diberikan stempel stambuk dan Milik perpustakaan.
- d. Pemeliharaan buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersih ruangan.
- e. Buku induk perpustakaan, buku peminjaman sudah dilaksanakan.
- f. Katalog perpustakaan masih terus dilengkapi.

4. Bidang BMN (Barang Milik Negara) Pengadilan Negeri Koba Tahun 2022

- a. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) sudah berjalan baik.
- b. Laporan SIMAK BMN semesteran dan tahunan sudah dikirim sesuai waktu yang ditetapkan.
- c. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Koba per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 25.508.782.341,-.

d. Berikut Aset Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Koba

Tabel 4. 7. Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Koba

NO	KETERANGAN TANAH	LUAS (M ²)	NILAI TAKSIRAN (RP)	ALAMAT	BUKTI KEPEMILIKAN	KET
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	7.375	Rp. 354.000.000	Jl. Gelora No. 1, Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah	Sertifikat No. 00066	
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	-	-	-	

Sarana dan prasarana gedung yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Koba sebagai berikut:

Tabel 4. 8. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Pengadilan Negeri Koba

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
I. RUANGAN			
1	Ruang Ketua	1	ruang
2	Ruang Wakil Ketua	1	ruang
3	Ruang Hakim	4	ruang
4	Ruang Panitera	1	ruang
5	Ruang Sekretaris	1	ruang
6	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	ruang
7	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	ruang
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	ruang
9	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1	ruang
10	Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	ruang
11	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	ruang
12	Ruang Panitera Pengganti	1	ruang
13	Ruang Server	1	ruang
14	Ruang Document Control	1	ruang
15	Ruang Rapat	1	ruang
16	Ruang Command Center	1	ruang
17	Ruang Jurusita	1	ruang

18	Ruang Sidang	4	ruang
19	Ruang Tunggu PTSP	1	ruang
20	Ruang Posbakum	1	ruang
21	Ruang Kasir	1	ruang
22	Ruang Inzage	1	ruang
23	Ruang Tunggu Jaksa	1	ruang
24	Ruang Penasihat Hukum/ BAPAS	1	ruang
25	Ruang Barang Bukti	1	ruang
26	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	ruang
27	Ruang Laktasi	1	ruang
28	Ruang Perpustakaan	1	ruang
29	Ruang Arsip	1	ruang
30	Ruang Mediasi	1	ruang
31	Ruang Kesehatan	1	ruang
32	Ruang Kaukus	1	ruang
33	Ruang Saksi	1	ruang
34	Ruang ATK	1	ruang
35	Gudang	1	ruang
36	Ruang Tahanan Dewasa	3	ruang
37	Ruang Tahanan Anak	2	ruang
38	Ruang Tunggu Sidang	2	ruang
39	Ruang Teleconference	1	ruang
40	Ruang Diversi	1	ruang
41	Ruang ADC	1	ruang

II. SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN

1	Komputer/ PC	21	Buah
2	Laptop	15	Buah
3	Lemari Besi/Metal	25	Buah
4	Lemari Kayu	9	Buah
5	Rak Besi	18	Buah
6	Brandkas	2	Buah
7	LCD Projector/Infocus	1	Buah
8	Meja Kerja Besi/Metal	28	Buah

9	Meja Kerja Kayu	63	Buah
10	Kursi Besi/Metal	155	Buah
11	Kursi Kayu	28	Buah
12	Sice	1	Buah
13	Bangku Panjang Besi/Metal	2	Buah
14	Meja Rapat	2	Buah
15	Meja Marmer	5	Buah
16	Kasur/Spring Bed	1	Buah
17	Mesin Absensi	1	Buah
18	Sofa	7	Buah
19	A.C. Split	12	Buah
20	Televisi	5	Buah
21	Loudspeaker	4	Buah
22	Sound System	1	Buah
23	Stabilisator	1	Buah
24	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah
25	Tiang Bendera	1	Set
26	Audio Mixing Console	1	Buah
27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Buah
28	LCD Monitor	1	Buah
29	Camera Conference	1	Buah
30	Kamera Digital	1	Buah
31	Komputer Jaringan Lainnya	1	Buah
32	Monitor	1	Buah
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah
34	Server	2	Buah
35	Router	6	Buah
36	Hub	1	Buah
37	Rak Server	1	Buah
38	CAT 6 Cable	3	Buah
39	Acces Point	4	Buah

Kendaraan Dinas terdiri 1 unit mobil dinas dan 4 unit motor dinas sebagai BMN milik Kantor Pengadilan Negeri Koba, 2 unit mobil dinas sebagai BMN milik Pemkab Bangka Tengah, dan 1 unit mobil dinas dengan status sewa oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 4. 9. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Koba

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I. JENIS KENDARAAN RODA 4						
1	Honda BR-V 1.5 EMT CKD	2019	v	-	-	BN 1052 TZ
2	Honda CR-V 2.0 CVT CKD	2020	v	-	-	BN 1097 TZ
3	Mitshubishi XPANDER ULTIMATE 1.5 4X2 AT B	2020	v	-	-	BN 1807 PI
4	Nissan GRAND LIVINA 1.5 MT	2018	v	-	-	BN 1561 TZ
II. JENIS KENDARAAN RODA 2						
1	Yamaha BYSON 150	2019	v	-	-	BN 2514 TZ
2	Yamaha BYSON 150	2019	v	-	-	BN 2515 TZ
3	Yamaha Vixion 150	2020	-	v	-	BN 5532 TZ
4	Yamaha Jupiter Z	2020	-	v	-	BN 5533 TZ

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Modernisasi manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutas, berita acara persidangan, supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang dan lain sebagainya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Koba telah meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung persidangan secara elektronik dikarenakan pandemi Covid 19. Persidangan secara elektronik ini sudah dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi serta implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Koba telah tersedia perangkat keras yang terdiri dari :

Tabel 4. 10. Perangkat Keras Pendukung SIPP

No.	Harware / Software	Jumlah/Uraian	Keterangan / Kondisi
1.	Server	2 Unit	Baik
2.	Mikrotik Router	2 Unit	Baik
3.	Laptop	15 Unit	Baik
4.	Hub/ switch	3 Unit	Baik
5.	Wifi Modem Router	8 Unit	Baik
7.	Koneksi Internet	<ul style="list-style-type: none">Telkom Indihome kecepatan Up to 50 MbpsIcon+ kecepatan 100 Mbps dedicated	Baik
8.	Komputer PC	21 Unit	Baik
9.	Web hosting	Kapasitas unlimited	Baik
10.	Access Point	8 Titik	Baik

1. Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka mengenai adminstrasi Perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara elektronik dengan mengakses alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pendaftaran perkara melalui e-court saat ini sudah dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yaitu terdiri dari Perorangan dan Badan Hukum.

Terdapat 4 Layanan yang dapat diberikan kepada pengguna :

- a. E-Filling (Pendaftaran perkara online)
- b. E-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara online)
- c. E-Summons (Pemanggilan pihak secara online)
- d. E-Litigasi (Persidangan secara online)

Pengadilan Negeri Koba pada Tahun 2022 sudah melaksanakan Administrasi Pengadilan secara elektronik dialamat website E-Court tersebut. Tercatat sudah 55 perkara yang telah terdaftar dalam aplikasi E-Court selama tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 31 Pendaftaran Perkara Gugatan Online
- b. 16 Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana Online
- c. 8 Pendaftaran Perkara Permohonan Online

Dari 55 perkara, telah dilaksanakan Persidangan secara elektronik/online (e-Litigasi) sebanyak 4 perkara. Dan 51 perkara belum dilaksanakan e-Litigasi dikarenakan salah satu pihak (tergugat) tidak menyetujui persidangan secara elektronik/online (e-Litigasi).

Dari 31 Perkara Gugatan Online, terdapat 2 perkara yang melakukan upaya hukum banding secara elektronik.

2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data serta layanan informasi. Pada saat ini Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan SIPP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang telah mencapai versi 5.1.0. Adapun sistem tersebut ditunjang oleh server yang memadai di ruang server Pengadilan Negeri Koba dan ditangani oleh 1 (satu) administrator yang siap menanggapi permasalahan yang timbul.

Adapun rincian spesifikasi server yang digunakan untuk menunjang implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Koba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 11. Rincian Spesifikasi Server Penunjang SIPP pada Pengadilan Negeri Koba

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Spesifikasi
1	Server Dell	1	<ul style="list-style-type: none"> • RAM : 16 GB • CPU : Intel® Xeon (R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz • HDD : 2 TB
2	Server Fujitsu	1	<ul style="list-style-type: none"> • RAM : 32 GB • CPU : Intel® Xeon (R) E-2134 CPU @3.50GHz x 8 • HDD : 2 TB

Dengan dikembangkannya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), para user SIPP di Pengadilan Negeri Koba terbantu untuk membenah data pada SIPP. Aplikasi MIS ini hanya merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kadah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/ kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Koba dilakukan dengan memperkuat system Manajemen mutu yang mengacu pada system yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari aspek Leadership, Customer Focus, Process Management, Strategic Planning, Resources Management, Document System, Performance Result. Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Meski tergolong masih baru berdiri, Pengadilan Negeri Koba berusaha untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan tersebut dengan membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor W7.U4/0461.a/OT.01.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 dan diperbarui dengan SK Terakhir Nomor : W7.U4/0898/SK/KP.04.6/6/2022 tanggal 15 Juni 2022.

Tim Akreditasi tersebut bertugas melakukan persiapan pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Koba dengan penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan.

Penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Koba dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 1 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI dan diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba. Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Negeri Koba mendapatkan predikat "A Excellent".

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu.

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan disatu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja.

Gambar 5. 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Koba menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana, hukum dan bagian umum untuk melayani pengunjung pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Koba, maka terkait standar pelayanan yang berlaku di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Negeri Koba memberikan kompensasi apabila

terdapat keluhan dari pengguna layanan Pengadilan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2020 Pengadilan Negeri Koba telah menerapkan sistem kompensasi ini.

Gambar 5. 2. Kompensasi PTSP



C. Inovasi Pelayanan Publik

1. Publikasi Perkara (*One Day Publish*)

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan *one day publish* ini adalah adanya direktori putusan Mahkamah Agung RI yang dapat diakses disitus www.putusan.mahkamahagung.go.id. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

Terkait hal tersebut Pengadilan Negeri Koba telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Koba pada website www.pn-koba.go.id pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan Pengadilan Negeri Koba.

Gambar 5. 3. Tampilan Halaman Utama Direktori Putusan

Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beranda / Pengadilan / PN Koba
PN Koba

Direktori

- Semua Direktori
- Pidana Umum 235
- Perdata 159
- Pidana Khusus 138
- Perdata Agama 54

Pengadilan

- PN Koba 532

Tahun

Putus	Register	Upload
2021 176	2021 164	2021 198
2020 255	2020 247	2020 236
2019 121	2019 141	2019 118
selengkapnya	selengkapnya	selengkapnya

Putusan **Pilihan**

Pengadilan » PN Koba » Perdata
Register : 10-11-2021 – Putus : 13-12-2021 – Upload : 16-12-2021
Putusan PN Koba Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kba
Tanggal 13 Desember 2021 – Penggugat melawan Tergugat
2 – 4

Pengadilan » PN Koba » Pidana Umum
Register : 15-11-2021 – Putus : 13-12-2021 – Upload : 16-12-2021
Putusan PN Koba Nomor 124/Pid.B/2021/PN Kba
Tanggal 13 Desember 2021 – Penuntut Umum:
Novriansyah, S.H
Terdakwa:
Selamat Alias Mamat Bin Dulhasan
1 – 0

Pengadilan » PN Koba » Pidana Khusus
Register : 23-11-2021 – Putus : 14-12-2021 – Upload : 16-12-2021
Putusan PN Koba Nomor 127/Pid.B/LH/2021/PN Kba
Tanggal 14 Desember 2021 – Penuntut Umum:
YUANITA, S.H.
Terdakwa:
IRYANTO alias IR bin MURHADI
2 – 5

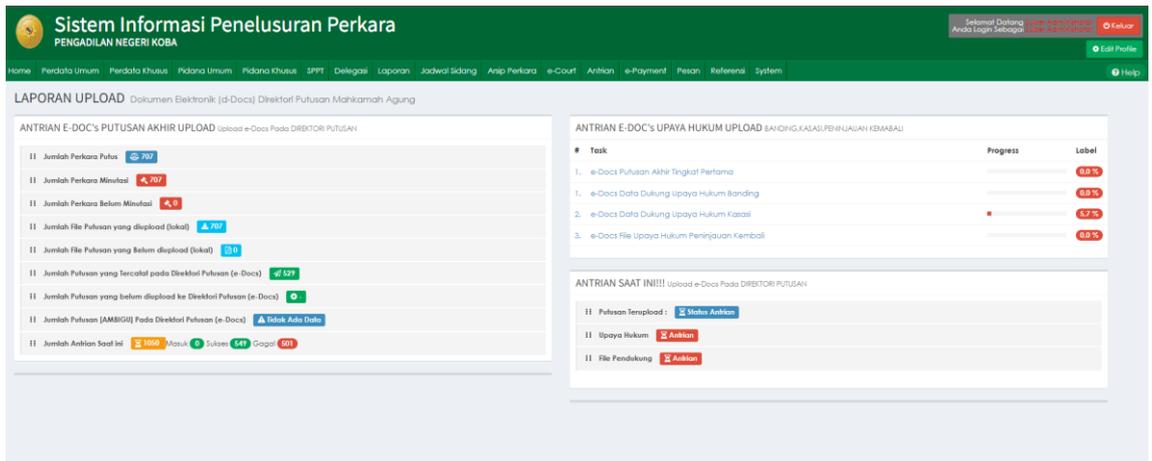
Pengadilan » PN Koba » Pidana Umum
Register : 15-11-2021 – Putus : 08-12-2021 – Upload : 10-12-2021
Putusan PN Koba Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kba
Tanggal 8 Desember 2021 – Penuntut Umum:
Fadillah Mahraini, S.H.
Terdakwa:
Depta Ari Prasetya Alias Depta Bin Yuyun Indrayani
4 – 2

Pengadilan » PN Koba » Pidana Khusus » Narkotika dan Psikotropika

Proses *upload* putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut. Terkait

dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan *one day publish*, dimana telah ada menu khusus pada aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktori putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

Gambar 5. 4. Menu Antrian Direktori Putusan pada Aplikasi SIPP

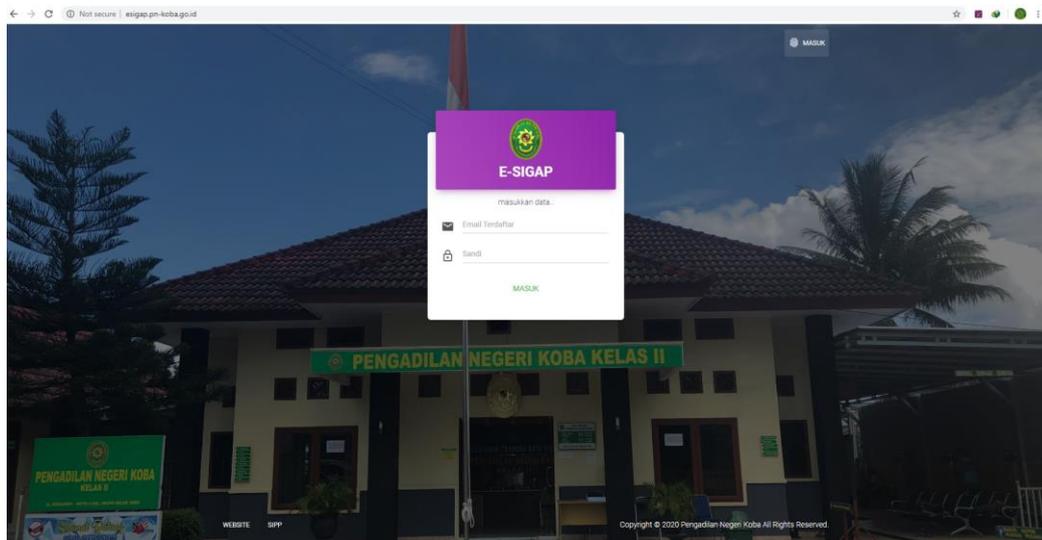


2. Aplikasi e-SIGAP

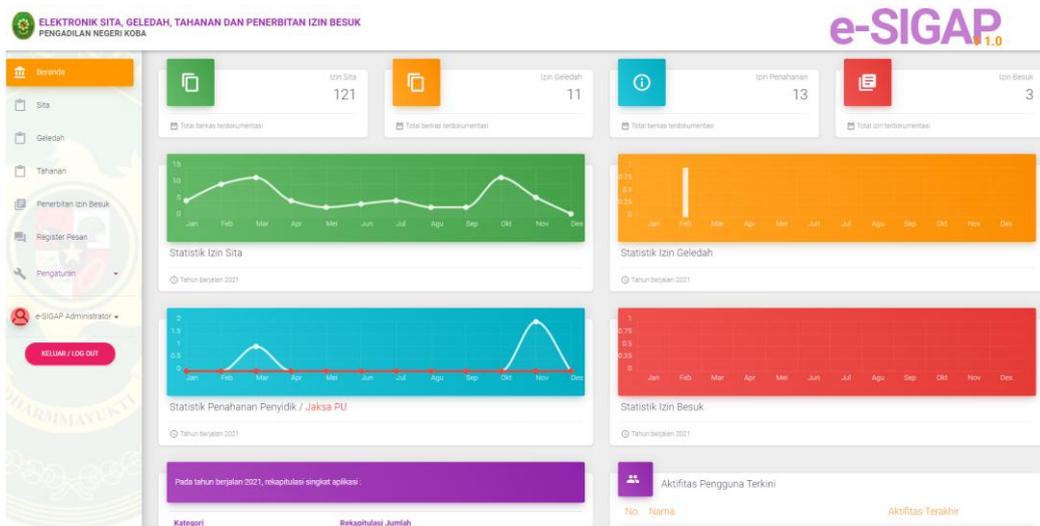
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Koba, maka dibuat aplikasi e-SIGAP (Elektronik Izin Sita, Geledah, Penahanan, dan Penerbitan Izin Besuk) yang diperuntukkan bagi Penyidik dan Instansi Kejaksaan yang akan melakukan administrasi peradilan. Sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk bolak-balik mengurus surat/dokumen persetujuan tersebut, cukup sekali datang untuk mengambil hasil cetak (penetapan/surat izin) dimaksud sekaligus menyerahkan dokumen permohonan (*hardcopy*) yang asli.

Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi e-SIGAP :

Gambar 5. 5. Tampilan Halaman Login Aplikasi e-SIGAP



Gambar 5. 6. Tampilan Halaman Depan Aplikasi e-SIGAP



3. Aplikasi SEMADE

SEMADE merupakan kepanjangan dari Sistem Manajemen Dokumen Elektronik, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan dokumen *Hardcopy* (Kertas, microfilm, dll) yang sudah dialihmediakan kedalam format digital dan telah diunggah kedalam sistem informasi tertentu berbasis website sehingga dapat diakses dari berbagai tempat.

- Tujuan

Sistem Manajemen Dokumen Elektronik bertujuan sebagai sebuah sistem yang membantu proses pengelolaan dan pengendalian dokumen *hardcopy* dilingkungan Pengadilan Negeri Koba.
- Manfaat
 - a. Produktivitas yang meningkat.

Adanya peningkatan produktivitas bisa terjadi disisi pencarian dokumen dan *broadcast* dokumen.
 - b. *Cost Efficiency*.

Dengan menggunakan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik, perusahaan bisa mengurangi biaya untuk pembelian kertas.
 - c. *Robust Security*.

Dokumen elektronik instansi bisa disimpan dalam tempat yang tersentralisasi, mengurangi kemungkinan tercecernya dokumen.
 - d. Mempercepat akses ke dokumen yang diperlukan.

Setiap *user* bisa langsung membuka aplikasi SEMADE dan mengakses dokumen yang diperlukan sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
 - e. Mempercepat aliran distribusi dan sharing dokumen.
 - f. Mengakses dokumen yang diperlukan dari mana saja.

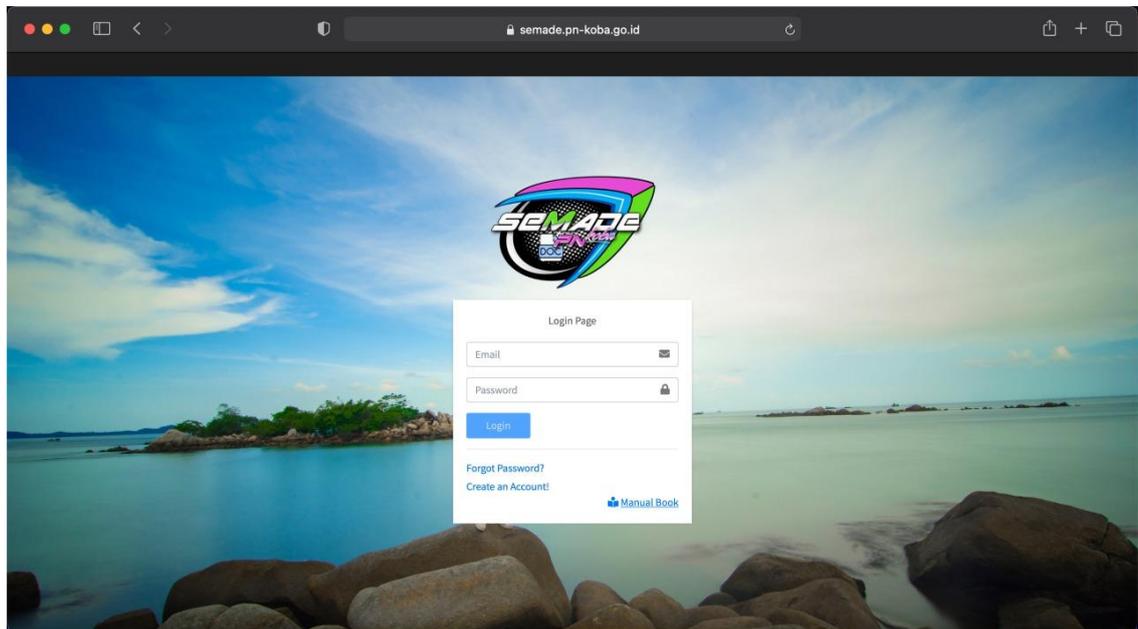
Selama ada koneksi internet yang terhubung dengan server SEMADE, maka aplikasi bisa diakses menggunakan PC atau *Smartphone*.
 - g. Mengatur *Permission* (Hak Akses) dengan lebih spesifik (*Security*).

Pengaturan pengguna yang memiliki akses *view*, *read*, *update/edit*, dan *delete* suatu dokumen.
 - h. Menelusuri *History Audit Trail* perubahan dokumen.
 - i. Mempermudah pencarian.

Dapat mengandalkan *search engine* yang dimiliki SEMADE.
 - j. Membantu mengelola seluruh dokumen yang dimiliki instansi.

Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi SEMADE :

Gambar 5. 7. Tampilan Halaman Login Aplikasi SEMADE



Gambar 5. 8. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SEMADE

No	Nama	Aktifitas Terakhir
1	Abad Ribunanurin	Rabu, 29 Desember 2021 13:01:11 WIB
2	Abad Ribunanurin	Rabu, 29 Desember 2021 12:58:42 WIB
3	Abad Ribunanurin	Rabu, 29 Desember 2021 12:53:08 WIB
4	Abad Ribunanurin	Rabu, 29 Desember 2021 12:50:56 WIB
5	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:49:30 WIB
6	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:41:29 WIB
7	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:30:06 WIB
8	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:16:46 WIB
9	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:16:40 WIB
10	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:16:33 WIB
11	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:16:17 WIB
12	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:16:08 WIB
13	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:16:00 WIB
14	Lia	Kamis, 23 Desember 2021 15:15:49 WIB

#	Kategori	Rekapitulasi Jumlah
1.	Akun User Aktif	26 Pengguna
2.	Dokumen SK	184 Berkas Terdokumentasi
3.	Dokumen SOP	10 Berkas Terdokumentasi
4.	Dokumen Manual Mutu	1 Berkas Terdokumentasi
5.	Dokumen Internal Audit	1 Berkas Terdokumentasi
6.	Dokumen SAKIP	20 Berkas Terdokumentasi
7.	Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen	1 Berkas Terdokumentasi
8.	Dokumen Manajemen Resiko	0 Berkas Terdokumentasi
9.	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Berkas Terdokumentasi
10.	Formulir	7 Berkas Terdokumentasi
11.	Dokumen Pendukung Inovasi	3 Berkas Terdokumentasi
12.	Notulen Sosialisasi dan Rapat	33 Berkas Terdokumentasi
13.	Laporan Pengawasan	38 Berkas Terdokumentasi
14.	Dokumen PTIP	4 Berkas Terdokumentasi

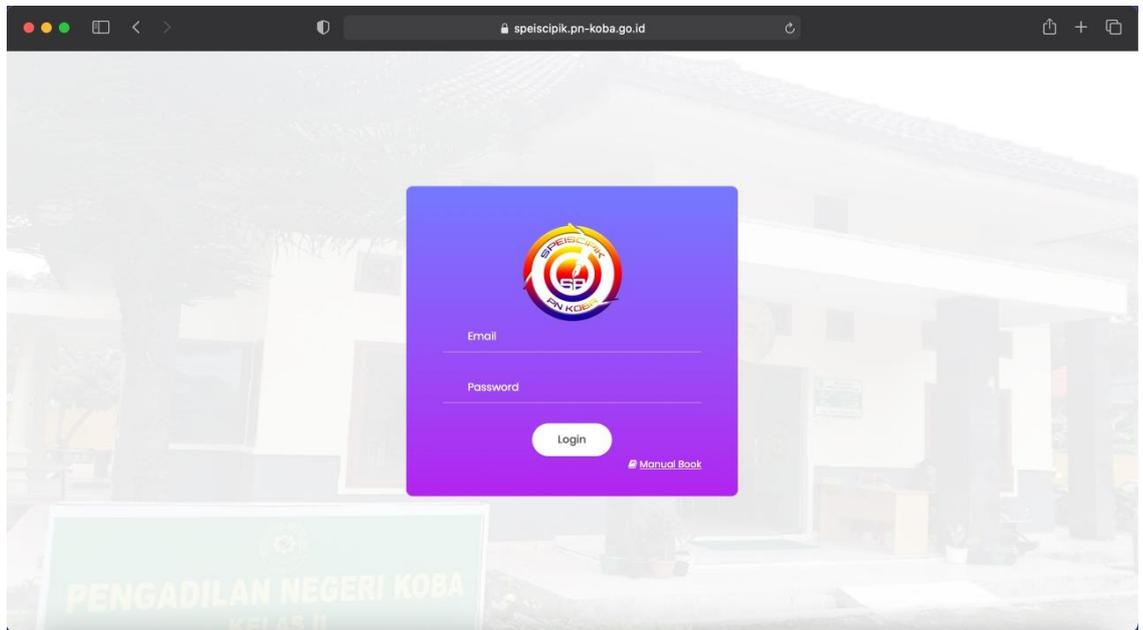
4. Aplikasi SPEISCIPIK

SPEISCIPIK singkatan dari Sistem Penelusuran Elektronik Informasi Sakit, Cuti, Pangkat, Izin dan KGB. Speiscipik merupakan sebuah aplikasi penyedia informasi Kepegawaian yang berkenaan dengan Data Sakit, Cuti, Pangkat, Izin dan KGB, yang akan diterapkan dan dilaksanakan di

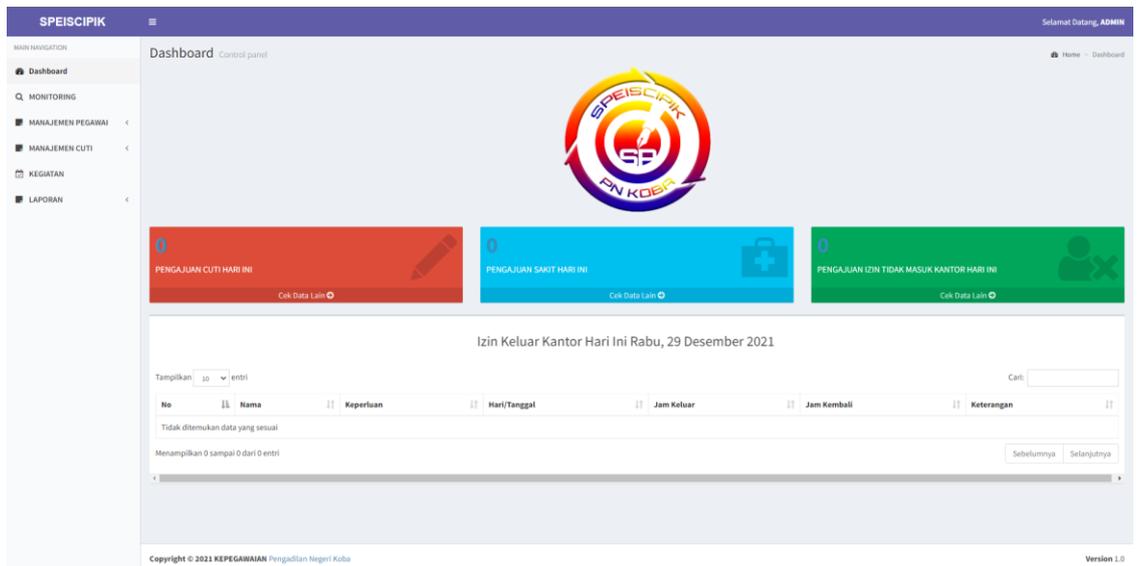
Pengadilan Negeri Koba, untuk mempermudah Pengguna (Hakim dan Pegawai) dalam mendapatkan informasi Kepegawaian.

Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi SPEISCIPIK :

Gambar 5. 9. Tampilan Halaman Login Aplikasi SPEISCIPIK



Gambar 5. 10. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SPEISCIPIK

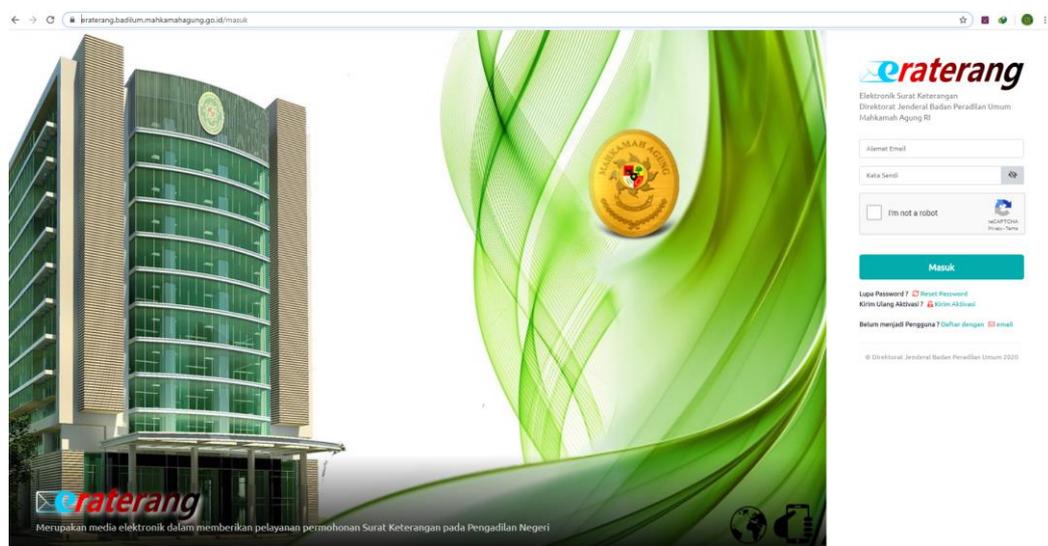


5. Aplikasi Eraterang

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada seluruh Pengadilan Negeri, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat aplikasi Eraterang yang merupakan Media Elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri, yang dapat diakses melalui alamat website : <http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>

Berikut adalah tampilan halaman antarmuka aplikasi eraterang :

Gambar 5. 11. Tampilan Halaman Login Aplikasi Eraterang



6. Aplikasi SIPANDANG

Sistem Informasi Persiapan Sidang atau disingkat sebagai Si-Pandang ini merupakan suatu bentuk optimalisasi proses persidangan di Pengadilan Negeri Koba.

Si-Pandang merupakan jawaban agar proses persidangan bisa sesuai dengan agenda persidangan. Selain itu, Si-Pandang akan memberikan beberapa manfaat:

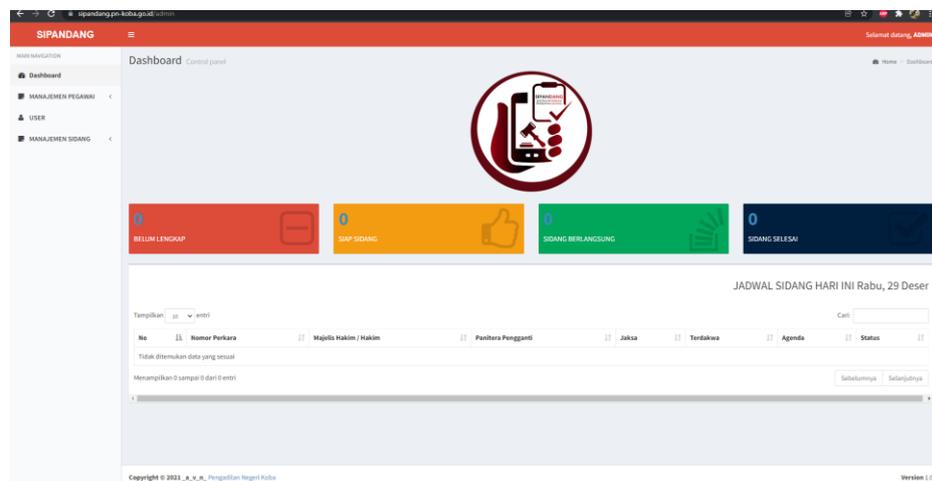
- Panitera Pengganti tidak perlu melaporkan sidang kepada Majelis Hakim secara manual;
- Proses persidangan bisa sesuai dengan agenda sidang;
- Majelis Hakim dapat mengetahui proses persidangan sudah siap dimulai dengan lebih mudah;

- Ketua Pengadilan bisa langsung memantau perkembangan proses persidangan dengan lebih mudah;

Gambar 5. 12. Tampilan Halaman Login Aplikasi SI-PANDANG



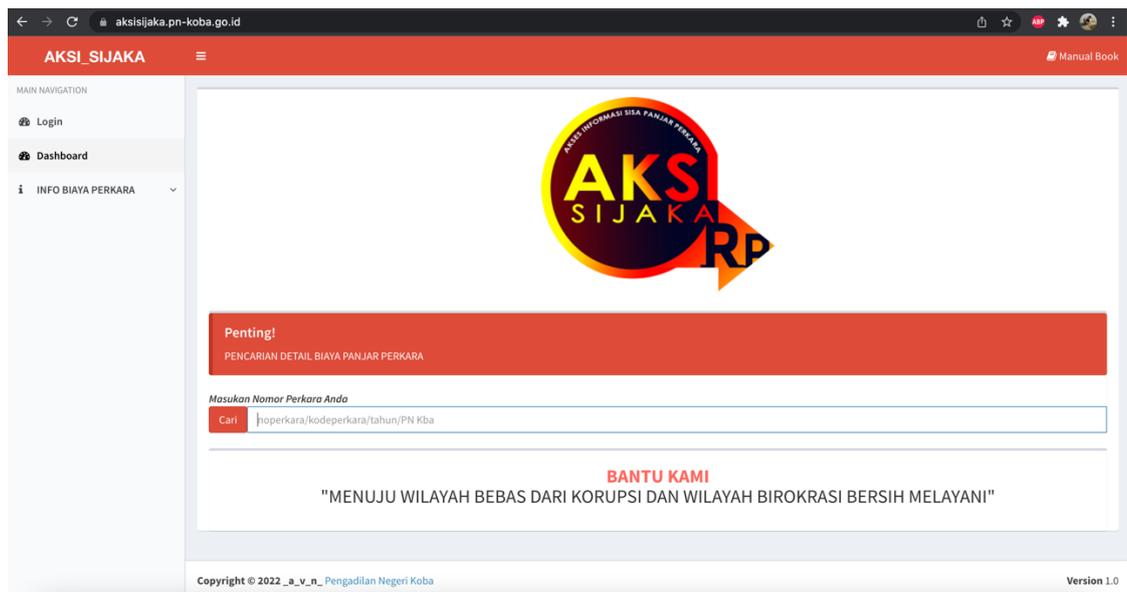
Gambar 5. 13. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SI-PANDANG



7. Aplikasi AKSI SIJAKA

Aplikasi AKSI SIJAKA merupakan aplikasi informasi publik mengenai sisa panjar biaya perkara baik perkara yang masih berjalan ataupun perkara yang sudah putus/minutasi dan juga sebagai media untuk menginformasikan pengembalian sisa panjar yang dikirim melalui email pihak yang terdaftar.

Gambar 5. 14. Tampilan Halaman Depan Aplikasi AKSI SIJAKA

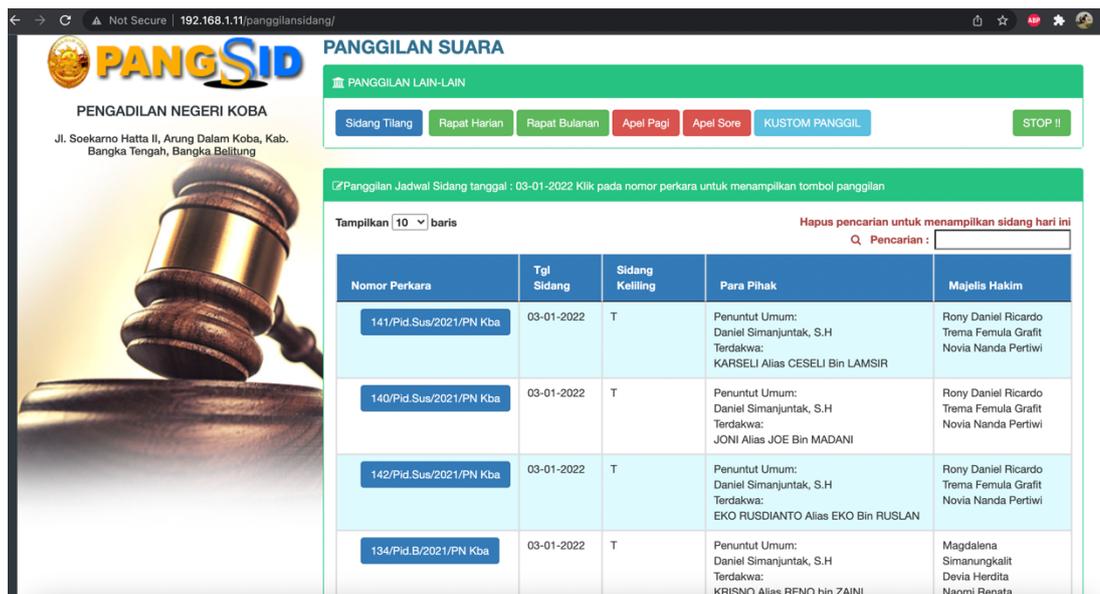


8. Aplikasi PANGSID

Aplikasi PANGSID merupakan sebuah inovasi Pengadilan Negeri Koba yang berupa aplikasi sidang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memberikan informasi panggilan sidang atas jadwal sidang yang sudah siap dimulai melalui *Sound System* pada gedung Pengadilan Negeri Koba.

Selain digunakan untuk panggilan sidang, aplikasi PANGSID juga berfungsi untuk melakukan panggilan Rapat dan Apel pada Pengadilan Negeri Koba. Sehingga lebih memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi panggilan rapat ataupun apel pada Pengadilan Negeri Koba.

Gambar 5. 15. Tampilan Halaman Aplikasi PANGSID



9. Layanan Whatsapp Bot (Si SELAWANG)

Si SELAWANG merupakan sebuah inovasi Pengadilan Negeri Koba yang berupa whatsapp bot yang merupakan program intelegensi buatan pada pesan whatsapp yang terintegrasi dengan Bot.

Si SELAWANG bertindak sebagai *Virtual Assistant* Pengadilan Negeri Koba yang dapat membantu para pencari keadilan untuk memperoleh berbagai informasi pada Pengadilan Negeri Koba dimanapun dan kapanpun melalui pesan whatsapp secara gratis tanpa biaya.

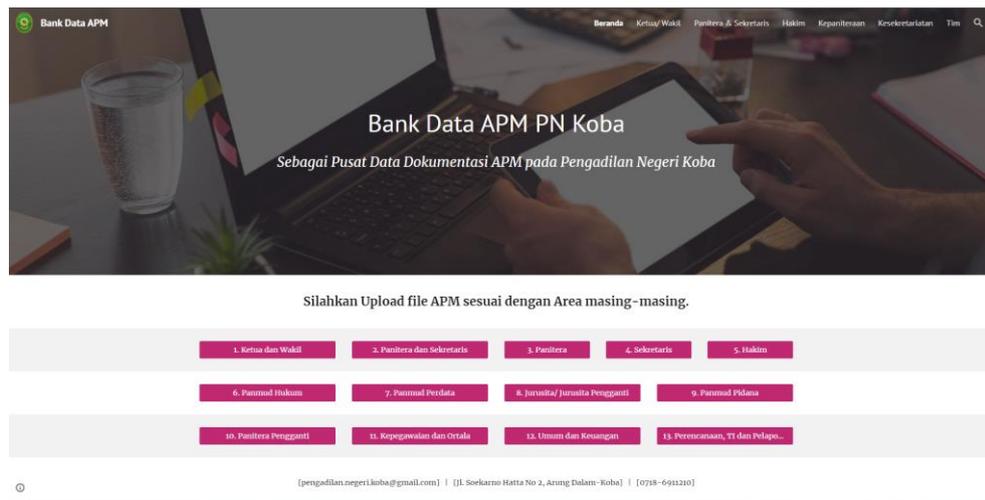
Gambar 5. 16. Nomor Layanan Whatsapp Bot Si SELAWANG



10. Aplikasi Bank Data APM

Merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk manajemen arsip berkas data fisik dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu kedalam bentuk digital, dan disimpan secara terpusat sehingga memudahkan pencarian data dan memberikan keamanan data pada Tim Document Control Pengadilan Negeri Koba.

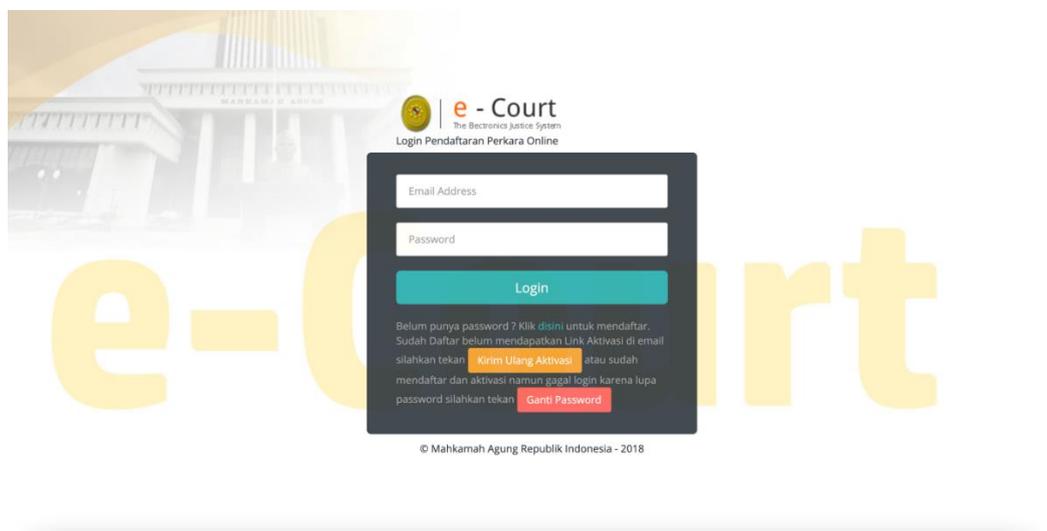
Gambar 5. 17. Tampilan Utama Aplikasi Bank Data APM



11. Aplikasi e-COURT Mahkamah Agung

Aplikasi e-COURT merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Gambar 5. 18. Tampilan Halaman Login Aplikasi e-COURT



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Koba telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambahkan beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku saat ini:

SK KPN Nomor: W7.U4/1191/SK/KP.04.6/8/2022

Tabel 6. 1. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Koba

No.	Hakim Pengawas Bidang	Nama	Jabatan
1	Kepaniteraan Muda Pidana	Magdalena Simanungkalit, S.H.	Hakim
2	Kepaniteraan Muda Perdata	Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.	Hakim
3	Kepaniteraan Muda Hukum	Devia Herdita, S.H.	Hakim
4	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.	Hakim
5	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Trema Femula Grafit, S.H., M.H.	Hakim
6	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Novia Nanda Pertiwi, S.H.	hakim

2. Secara rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Koba.

- Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan.
- 3. Secara berkala dilakukan rapat berjenjang mulai dari rapat masing-masing kepaniteraan dan sub bagian, rapat pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan, rapat pimpinan untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
- 4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah seusai SOP.
- 5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Koordinator Pengawasan atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba.
- 6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

B. Evaluasi

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Koba.
2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga PPNPN yang diberdayakan untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai PPNPN.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Koba yang mengakibatkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan, antara lain seperti:
 - a. Belum adanya mesin antrian pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Belum adanya mesin antrian pada Ruang Tunggu Sidang;
 - c. Belum optimalnya speaker untuk pemanggilan para pihak sehingga untuk pemanggilan sidang masih manual;
 - d. Belum optimalnya mesin genset untuk dapat mengatasi terjadinya pemadaman listrik;
 - e. Belum tercukupinya sarana pengolah data dan informasi pendukung SIPP;
4. Tidak tercukupinya anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Masih kurangnya SDM pada Pengadilan Negeri Koba sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk mengajukan permohonan permintaan tenaga tambahan kepada PEMDA setempat yang akan diperbantukan pada Pengadilan Negeri Koba;
3. Jurusita pada Pengadilan Negeri Koba hanya berjumlah 2 orang dan tidak ada jurusita pengganti;
4. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba hanya berjumlah 1 orang sehingga para Panitera Muda ikut membantu jalannya persidangan.
5. Dalam hal penyelesaian perkara selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Koba telah menyelesaikan perkara sebagai berikut:
 - Perkara Perdata:
 - Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2022 sebanyak 59 perkara, yang terdiri dari 4 perkara sisa tahun 2021 dan 55 perkara baru tahun 2022.
 - Perkara Pidana:
 - Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2022 sebanyak 191 perkara, yang terdiri dari 14 perkara sisa tahun 2021 dan 177 perkara baru tahun 2022.
 - Total Perkara Lalu Lintas yang ditangani selama Tahun 2022 sebanyak 1.607 perkara.
6. Realisasi DIPA TA 2022 adalah sebesar 99,85% untuk DIPA 01 dan 98,94% untuk DIPA 03;
7. Dukungan TI untuk penunjang SIPP yaitu berupa Aplikasi SIPP yang telah menggunakan versi terakhir yaitu 5.1.0; dan Aplikasi MIS yang telah menggunakan versi 1.5;

8. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website "**www.pn-koba.go.id**" dengan cara selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Koba.
9. Pengadilan Negeri Koba sudah melaksanakan administrasi pengadilan secara elektronik menggunakan aplikasi e-Court, tercatat sudah 55 perkara yang telah terdaftar selama tahun 2022. Dari total perkara tersebut sudah pernah dilakukan persidangan secara online (e-Litigasi) pada beberapa perkara.
10. Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2022 adalah sebesar 94 surat sedangkan untuk Surat Keluar sebesar 270 surat
11. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Koba telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan efisien.

B. Rekomendasi

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka berikut ini beberapa rekomendasi agar tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Koba :

1. Terkait pengelolaan pegawai agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Koba dengan rincian sebagai berikut:
 - Hakim sebanyak 5 orang;
 - Panitera Pengganti sebanyak 15 orang;
 - Jurusita sebanyak 1 orang;
 - Jurusita Pengganti sebanyak 6 orang;
 - Analisis Perkara Peradilan sebanyak 3 orang;
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 1 orang;
 - Analisis SDM Aparatur sebanyak 1 orang;
 - Pengelolaan Data Informasi dan Hukum sebanyak 2 orang;
 - Pengelola Sistem dan Jaringan sebanyak 1 orang;
 - Bendahara sebanyak 2 orang;
 - Pengelola Kepegawaian sebanyak 1 orang;
 - Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur sebanyak 1 orang;
 - Pengadministrasi Persuratan sebanyak 2 orang;
 - Penyusunan Laporan Keuangan sebanyak 1 orang;
 - Pengelola BMN sebanyak 1 orang;
 - Paranata Barang dan Jasa sebanyak 1 orang;
 - Ajudan sebanyak 2 orang;
 - Teknis Sarana dan Prasarana sebanyak 2 orang;
2. Secara rutin diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM di Pengadilan Negeri Koba.
3. Terkait pengelolaan perkara, diharapkan supaya ada petunjuk tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun berkaitan dengan penyelesaian perkara yang sedang ditangani pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai target minimalisasi sisa perkara pada setiap akhir tahun.

LAMPIRAN

SK TIM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II



PENGADILAN NEGERI Koba

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba

Nomor: W7.U4/ ~~267~~ /KP.04.6/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI Koba

KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor W7.U4/2036/KP.04.6/12/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba.
- Menimbang : 1. bahwa Pengadilan Negeri Koba sebagai salah satu instansi Pemerintah, yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022;
3. Bahwa nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022;
4. bahwa untuk menjalankan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibuatkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun

- 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 3 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II. |
| Pertama | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor W7.U4/2036/KP.04.6/12/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba. |
| Kedua | : | Menunjuk dan menugaskan Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola dan Penyusun Laporan kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Koba. |
| Ketiga | : | Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Koba

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



RIZAL TAUFANI

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : W7.U4/224/KP.04.6/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

**TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI Koba**

- Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Koba
- Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Negeri Koba
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Koba
- Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- Anggota : 1. Panitera Muda Hukum
2. Panitera Muda Pidana
3. Panitera Muda Perdata
4. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
5. Kasubbag Umum dan Keuangan
6. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Ditetapkan Di : Koba
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,


RIZAL TAUFANI

LAMPIRAN

DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) HAKIM DAN PEGAWAI TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II



DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) HAKIM DAN PEGAWAI

TAHUN 2022

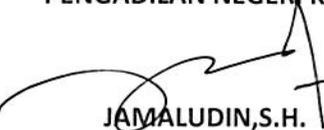
PENGADILAN NEGERI KOTA KELAS II

NO	NAMA	NIP	PANGKAT JABATAN				MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TEMPAT & TANGGAL LAHIR	CAT.MUTASI PEGAWAI (KP)	KET.
			GOL/RUAN G	TMT	NAMA	TMT	TH	BLN	NAMA	TH	JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TK.T IJAZAH			
1	RIZAL TAUFANI,S.H.,M.H	19770407 200312 1 001	IV / a	1-4-2020	Ketua	04-05-2021	18	1	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	2021		Universitas 17 Agustus 1945	2007	S2	Yogyakarta 07-04-1977	SK NO 1344/DJU/SK /KP.04.5/5/ 2021	
2	DERIT WERDININGSIH,S.H	19780430200502 2 002	IV / a	24-02-2021	Wakil Ketua	21-01-2022	16	11	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		Sekolah Tinggi Hukum Indonesia	2003	S1	Jakarta Pusat, 30-04-1978	SK NO.27/KMA/ SK/I/2022	
3	RAHARDHI PERDANA,S.H.,M.H	19780622 200212 1 008	III/d	1-4-2018	Panitera	26-10-2018	17	0	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2021		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2015	S2	Jakarta Timur, 22-06-1978	NO.1927/DJU /SK/KP.04.5/9 /2018	
4	JAMALUDIN,S.H	19770424 200604 1 003	III/d	1-4-2021	Sekretaris	26-10-2018	10	9	Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII	2016		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2010	S1	Pangkalpinang, 24-4-1977	NO.563/SEK/ KP.I/SK/X/ 2018	
5	ERWIN MARANTIKA, S.H.	19760302 201101 1 005	III / c	1-4-2019	Panitera Muda Hukum	26-10-2018	11	0	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jurusita	2020		Universitas Sriwijaya	2000	S1	Palembang, 02-03-1976	No.1927/DJU /SK/KP.04.5/9 /2018	
6	OSKAR SYAIFULLAH,S.Kom.	19861012 2011011 014	III/ c	1-4-2019	Kasubbag Umum & Keuangan	26-10-2018	11	0	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	2019		Universitas Budi Luhur	2009	S1	Pangkalpinang, 12-10-1986	NO.563/SEK/ KP.I/SK/X/ 2018	
7	YUSBET HARIRI,S.H	19840917 200604 1 002	III/ c	1-10-2019	Panitera Muda Pidana	26-10-2018	10	9	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2021		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2011	S1	Mentok, 17-09-1984	No.1927/DJU /SK/KP.04.5/9 /2018	
8	PADLI, S.H	19820514 200604 1 004	III / c	1-10-2020	Panitera Muda Perdata	26-10-2018	10	9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jurusita	2020		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2012	S1	Pangkalpinang, 14-5-1982	No.1927/DJU /SK/KP.04.5/9 /2018	
9	NUR KAMALIA, S.H.	19860122 200604 2001	III / c	1-10-2021	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	26-10-2018	10	9	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	2020		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2012	S1	Pangkalpinang, 22-01-1986	NO.563/SEK/ KP.I/SK/X/ 2018	
10	YEYEN WAHYUNI,S.Kom	19860326 200904 2 005	III / b	1-10-2019	Kasubbag PTIP	23-08-2019	10	9	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	2020		STMIK ATMA LUHUR	2014	S1	Bangka Tengah, 26-03-1986	No.635/SEK /KP.I/SK/VIII/ 2019	

11	EKO ARFANDI, S.H.	19840408 200912 1 009	III / b	1-10-2019	Jurusita	26-10-2018	7	1	Sertifikasi Bendahara	2020		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2014	S1	Pangkalpinang, 08-04-1984	No.1930/DJU /SK/KP.04.5/ 9/ 2018
12	RENDRA,S.H	19821021 201408 1 001	III / b	1-04-2021	Panitera Pengganti	09-03-2020	14	7	Pelatihan Prajabatan Gol II Angkatan XL	2015		STIH SUMPAH PEMUDA PALEMBANG	2010	S1	Bangka, 21-10-1982	No.31/DJU /SK/KP.04.5/1 /2020
13	TREMA FEMULA GRAFIT, S.H.	19920828 201712 2 001	III / b	1-10-2021	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		Universitas Sultan Agung Tirtayasa	2015	S2	Magetan, 28-08-1992	No.540/DJU/ SK/KP.04.5/3/ 2020
14	RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H	1993082 120171 2 2001	III / b	1-10-2021	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		Universitas Airlangga Surabaya	2017	S2	Kediri, 21-08-1993	No.540/DJU/ SK/KP.04.5/3/ 2020
15	MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H	19931001 201712 2 003	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		Univ. Katholik Ind. Atmajaya	2016	S1	Medan, 1-10-1993	No.540/DJU/ SK/KP.04.5/3/ 2020
16	NOVIA NANDA PERTIWI, S.H	19931103 201712 2 001	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		UNPAD	2015	S1	Bandung, 3-11-1993	No.540/DJU/ SK/KP.04.5/3/ 2020
17	DEVIA HERDITA, S.H	19940522 201712 2 002	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		Universitas Bangka Belitung Pangkalpinang	2016	S1	Jebus, 22-5-1994	No.540/DJU/ SK/KP.04.5/3/ 2020
18	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H	19941222 201712 2 001	III / a	1-12-2017	Hakim	19-03-2020	4	1	Diklat Sertifikasi SPPA	2019		Universitas Indonesia	2016	S1	Medan, 22-12-1994	No.540/DJU/ SK/KP.04.5/3/ 2020
19	HARDI JUMAIDI,S.H	19921009 201903 1 003	III / a	1-3-2019	Analisis Perkara Peradilan	08-4-2020	2	10	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	2021		STIH YAPERTIBA Pangkalpinang	2018	S1	Payung, 9-10-1992	No.02/SEK /PNS.04.1/SK /II/2020
20	SARTIKA RATNASARI SINAGA,S.,E	19940623 201903 2 011	III / a	1-3-2019	Analisis Sumber Daya Manusia	08-4-2020	2	10	Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkatan 104/CIV	2019		UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA	2017	S1	Simalungun, 23-06-1994	No.02/SEK /PNS.04.1/SK /II/2020
21	MARIHOT PANGIHUTAN	19770110 200604 1002	II/d	1-4-2018	Jurusita	19-8-2019	15	9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jusrita	2020		SMAN 4 Pangkalpinang	1995	SLTA	Pangkalpinang, 10-01-1977	No.2502/DJU /SK/KP.04.5/7 /2019
22	ABAD RIBUNANURIN,AM.d	19891007 201903 1 002	II/c	1-3-2019	Pengelola Sistem & Jaringan	01-4-2020	2	10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera & Jusrita	2020		POLITEKNIK NEGERI BATAM	2013	D3	Kediri, 07-10-1989	No.W7.U/ 0549/SK/KP.0 0.3/3/2020

Koba, 5 Januari 2022
 MENGETAHUI,
 KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA

 RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.
 NIP.19770407 200312 1 001

SEKRETARIS,
 PENGADILAN NEGERI KOBA

 JAMALUDIN, S.H.
 NIP.19770424 200604 1 003